

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PERUBAHAN (RKPPD)  
KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2017**



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON  
TAHUN 2017**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen perencanaan tahunan sebagai bagian dari proses perencanaan jangka pendek disusun melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Hal ini diperkuat juga melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dalam Pasal 260 ayat (1), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam Pasal 69 ayat (1), dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 17 ayat (2).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud di atas merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Pasal 5 ayat (3) yang menyebutkan “RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat”, serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 129 ayat (3) yang menyebutkan bahwa RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selain itu berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dan dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, RKPD merupakan dasar/pedoman untuk penyusunan



rancangan APBD. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja, program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD harus terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Perubahan RKPD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 tentang Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
  - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  - 17) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
  - 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
  - 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
  - 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam



- Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
  - 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Saerah Tahun 2017;
  - 24) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17);
  - 25) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 15 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
  - 26) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 18 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 25);
  - 27) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - 28) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintahan Daerah Kota Cirebon;
  - 29) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon



(Lembar Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembar Daerah Kota Cirebon Nomor 70);

30) Peraturan Walikota Cirebon Nomor 38 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 38).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 adalah :

1. Menyesuaikan dengan perkembangan keadaan tahun berjalan, dimana perlu adanya penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
2. Mewujudkan pencapaian visi dan misi Kota Cirebon.
3. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan.
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
5. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.



## **BAB II**

### **ARAH KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN PERUBAHAN TAHUN 2017**

#### **2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Perubahan Tahun 2017**

Tahun 2017 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kota Cirebon 2013 – 2018 (Perda Nomor 11 Tahun 2015 ttg Perubahan Perda Nomor 7 tahun 2013 tentang RPJMD Kota Cirebon 2013-2018), arah Kebijakan Pembangunan masih mengacu pada dokumen tersebut. Khusus untuk Perubahan APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Daerah Kota Cirebon fokus pada penuntasan pencapaian target rencana tahun 2017 dengan memperhatikan pada waktu efektif pelaksanaan perubahan APBD TA. 2017 yang hanya tersisa waktu kurang dari 3 bulan.

#### **2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Perubahan 2017**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 310 ayat (1) bahwa Kepala daerah dalam penyusunan rancangan APBD menetapkan prioritas dan plafon anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Dan berdasarkan hal tersebut maka seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Anggaran sebagai bahan masukan bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 81 ayat (1) disebutkan asumsi yang mendasari atas terjadinya perubahan APBD yaitu :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.



4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Selanjutnya disebutkan dalam ayat (2) dan (3) bahwa pemerintah daerah dalam, keadaan darurat, dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan / atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Adapun kriteria keadaan darurat adalah sebagai berikut :

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya.
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
- c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan keadaan darurat.

Perubahan APBD ini hanya diperkenankan satu kali sementara yang disebut dengan keadaan luar biasa dalam pasal 82 ayat (2) disebutkan bahwa keadaan luar biasa adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%.

Sejak ditetapkannya APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017, terdapat beberapa perkembangan yang mengindikasikan perlu adanya penyesuaian dalam asumsi pendapatan, belanja maupun pembiayaan yang akan berdampak pada perubahan postur APBD Kota Cirebon.

Adapun asumsi yang mendasari perubahan APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 diantaranya adalah :

- a. Perkembangan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
- b. Perubahan dari plafon anggaran belanja yang berlebihan kepada anggaran yang diperkirakan kurang, dan perubahan kode rekening belanja sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan realisasi anggaran.
- c. Penganggaran program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBN Tahun Anggaran 2017 yang belum masuk dalam APBD awal.



- d. Perubahan APBD dilakukan karena terjadinya perubahan pendapatan yang berasal dari penambahan pajak-pajak daerah, pendapatan BOS yang bersumber dari APBN pada pendapatan asli daerah, dana bagi hasil pajak pada dana perimbangan dan bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- e. Perubahan alokasi belanja tidak langsung khususnya belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 dan dan Peraturan Walikota Cirebon No.42 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Cirebon No 12 Tahun 2017.
- f. Penyesuaian terhadap juklak juknis dan peraturan yang menjadi pedoman kegiatan yang diterbitkan setelah pengesahan APBD awal.
- g. Perubahan pembiayaan pada komponen penerimaan pembiayaan yaitu tambahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2016 yang telah diaudit BPK dan pada perubahan komponen pengeluaran pembiayaan yaitu adanya tambahan penyertaan modal.
- h. Penyesuaian tunjangan pimpinan dan anggota DPRD berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- i. Pendanaan kegiatan lanjutan sesuai dengan ketentuan Pasal 138 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
- j. Pendanaan kegiatan untuk kesehatan, pendidikan. Dan infrastruktur kota dan kegiatan lain yang mengimplementasikan Visi dan Misi Walikota.



## 1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 164.885.589.757,00 dari Pendapatan Daerah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1.304.838.779.300,00 menjadi Rp 1.469.931.604.769,00 atau naik sebesar 12,64 persen. Kenaikan Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari:

### a. Pendapatan Asli Daerah

Ditargetkan naik sebesar Rp 79.605.977.469,00 dari Rp 390.325.627.300,00 menjadi Rp 469.931.604.769,00 atau naik sebesar 20,39 persen. Kenaikan tersebut berasal dari penambahan Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Alokasi BOS Pusat).

### b. Dana Perimbangan

Ditargetkan naik sebesar Rp 20.955.574.972,00 dari Rp 842.093.152.000,00 menjadi Rp 863.048.726.972,00 atau naik sebesar 2,49 persen. Kenaikan tersebut berasal dari akumulasi penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, penurunan DAU dan penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun 2016 yang tertunda penyalurannya dan akan disalurkan pada Tahun 2017.

### c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Ditargetkan naik sebesar Rp 64.324.037.316,00 dari Rp 72.420.000.000,00 menjadi Rp 136.744.037.316,00 atau naik sebesar 88,82 persen. Kenaikan tersebut berasal dari alokasi kurang bayar pajak provinsi dan Bantuan Keuangan dari Provinsi yang baru diterima setelah APBD Kota Cirebon Tahun 2017 ditetapkan. Apabila di kemudian hari terjadi perubahan pendapatan yang berasal dari dana perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 yang berada di dalam



komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, maka akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

## 2. Belanja Daerah

Belanja pada perubahan APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 direncanakan naik sebesar Rp 208.161.812.407,00 dari semula Rp 1.359.594.779.300,00 menjadi sebesar Rp 1.567.756.591.707,00 atau naik sebesar 15,31 persen.

Kebijakan belanja daerah pada tahun 2017 adalah mengakomodir asumsi-asumsi yang mendasari terjadinya perubahan APBD yang terkait dengan belanja daerah, selain itu juga perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) terkait dengan keterbatasan pendapatan sebagai sumber pendanaan belanja program kegiatan, tidak semua Perangkat daerah mendapatkan tambahan alokasi pagu belanja pada Perubahan APBD Tahun 2017, untuk itu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon harus mengoptimalkan anggaran yang tersedia diantaranya dengan melakukan penelaahan terhadap belanja yang dimungkinkan untuk direalokasikan anggarannya kepada belanja program/kegiatan lain yang lebih prioritas.
- b) Tidak diperkenankan untuk menganggarkan pos hibah dan bantuan sosial baik berupa uang maupun barang kecuali yang sudah masuk Perwali CPCL.
- c) Mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan dalam Perubahan APBD Tahun 2017, maka tidak diperkenankan menganggarkan belanja kegiatan baik fisik maupun non fisik yang diperkirakan proses pelelangan sampai dengan pelaksanaannya tidak akan selesai pada akhir tahun 2017.

## 3. Pembiayaan Daerah

Beberapa kebijakan Pembiayaan Daerah antara lain :

- a. Mendefinitifkan SiLPA hasil audit BPK RI.

SiLPA Tahun Anggaran 2016 menurut Laporan Realisasi APBD adalah sebesar Rp 91.792.566.650,00 Dari SiLPA tersebut sebesar



Rp 47.000.000.000,00 sudah dipasang pada APBD Murni Tahun 2017 untuk membiayai program dan kegiatan. Selain SiLPA berhadapan yang telah terpasang di APBD Murni 2017, terdapat beberapa SiLPA berhadapan lain diantaranya SiLPA DAK Tambahan, SiLPA BLUD, SiLPA JKN dan SiLPA Bantuan Keuangan Provinsi yang dananya sudah masuk ke kas daerah namun belum direalisasikan belanjanya.

- b. Penyertaan Modal kepada BJB sebesar Rp 1.516.344.000,00



**Tabel 2.2**

**Daftar Pagu Indikatif Belanja Langsung Per SKPD  
Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017**

<b>No</b>	<b>SKPD</b>	<b>Anggaran Semula (Rp)</b>	<b>Anggaran Perubahan (Rp)</b>	<b>Selisih (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	DINAS PENDIDIKAN	41.957.677.800,00	82.072.877.800,00	40.115.200.000,00	
2	DINAS KESEHATAN	335.849.485.696,00	417.776.450.846,00	81.926.965.150,00	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	124.291.699.399,45	182.709.230.399,45	58.417.531.000,00	
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.667.229.972,00	5.667.229.972,00	1.000.000.000,00	
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5.935.510.500,00	6.035.510.500,00	100.000.000,00	
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	4.661.351.000,00	5.661.351.000,00	1.000.000.000,00	
7	KANTOR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.630.000.000,00	1.630.000.000,00	0,00	
8	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	2.672.351.933,00	2.972.351.933,00	300.000.000,00	
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.568.919.889,00	4.743.919.889,00	175.000.000,00	
10	DINAS TENAGA KERJA	2.135.135.900,00	2.135.135.900,00	0,00	



No	SKPD	Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
11	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	7.851.334.100,00	9.423.775.103,00	1.572.441.003,00	
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	13.236.069.834,00	13.266.069.834,00	30.000.000,00	
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.439.577.800,00	3.539.577.800,00	100.000.000,00	
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.595.057.000,00	3.795.057.000,00	200.000.000,00	
15	DINAS PERHUBUNGAN	19.757.943.900,00	23.247.943.900,00	3.490.000.000,00	
16	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	8.024.993.944,00	10.649.993.944,00	2.625.000.000,00	
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.768.243.922,55	3.918.243.922,55	150.000.000,00	
18	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	7.181.811.400,00	8.662.811.400,00	1.481.000.000,00	
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.718.243.900,00	3.068.243.900,00	350.000.000,00	
20	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	8.449.133.415,00	8.749.133.415,00	300.000.000,00	
21	SEKRETARIAT DAERAH	27.656.439.700,00	32.606.439.700,00	4.950.000.000,00	
22	SEKRETARIAT DPRD	17.300.000.000,00	22.300.000.000,00	5.000.000.000,00	
23	KECAMATAN KEJAKSAN	5.407.475.000,00	5.407.475.000,00	0,00	
24	KECAMATAN KESAMBI	7.063.670.000,00	7.063.670.000,00	0,00	
25	KECAMATAN HARJAMUKTI	8.268.929.100,00	8.268.929.100,00	0,00	
26	KECAMATAN LEMAHWUNGKUK	6.030.676.725,00	6.030.676.725,00	0,00	
27	KECAMATAN PEKALIPAN	5.423.689.760,00	5.423.689.760,00	0,00	
28	INSPEKTORAT	4.400.000.000,00	4.950.000.000,00	550.000.000,00	



<b>No</b>	<b>SKPD</b>	<b>Anggaran Semula (Rp)</b>	<b>Anggaran Perubahan (Rp)</b>	<b>Selisih (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.902.773.750,00	6.052.773.750,00	1.150.000.000,00	
30	BADAN KEUANGAN DAERAH	13.977.781.000,00	15.077.781.000,00	1.100.000.000,00	
31	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	5.027.098.101,00	5.939.898.101,00	912.800.000,00	
	<b>JUMLAH</b>	<b>711.850.304.441,00</b>	<b>921.277.513.898,00</b>	<b>209.427.209.457,00</b>	

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, 2017



### 2.2.1 Gambaran Sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Pendapatan daerah selain berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga dapat berasal dari pendapatan asli daerah dan juga lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sebagian besar sumber pendapatan daerah Kota Cirebon selama ini berasal dari Dana Perimbangan, hal ini dapat terlihat dalam perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Cirebon selama lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2012 – 2016. Tabel berikut memperlihatkan perbandingan realisasi masing-masing jenis pendapatan daerah dalam total pendapatan APBD Kota Cirebon selama lima tahun terakhir.

**Tabel 2.3**  
**Struktur APBD Kota Cirebon**  
**Tahun 2012 – 2016**  
**( dalam rupiah )**

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Total Pendapatan Daerah
2012	149.489.858.160,00	653.010.223.492,00	69.625.218.522,00	872.125.300.174,00
2013	206.019.069.726,00	630.248.138.233,00	173.683.191.280,00	1.009.950.398.560,00
2014	298.539.011.144,00	689.248.441.689,00	246.278.482.530,00	1.234.065.935.363,00
2015	319.893.842.205,00	773.113.885.766,00	310.858.957.468,00	1.403.866.685.439,00
2016	363.117.732.284,00	870.837.793.607,00	139.669.280.832,00	1.373.624.806.723,00

Sumber : BKD Kota Cirebon

Dari tabel diatas dapat dilihat masih rendahnya kemandirian keuangan Pemerintah Kota Cirebon dan mengindikasikan adanya ketergantungan yang cukup tinggi pada pemerintah pusat dalam



membayai berbagai urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Cirebon.

Untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah Pemerintah Kota Cirebon senantiasa melakukan upaya untuk meningkatkan peran Pendapatan Asli Daerah, karena dengan meningkatnya kemandirian daerah dapat memberikan keleluasaan ruang gerak bagi pemerintah untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsi strategisnya dalam mengambil kebijakan yang diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Hasil dari upaya Pemerintah Kota Cirebon tersebut dapat dilihat dari meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya dan pada realisasi tahun 2016 persentasenya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.4**

**Struktur APBD Kota Cirebon  
Tahun 2012 – 2016**

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendaatan Daerah Yang Sah	Total APBD
2012	17,14%	74,88%	7,98%	100,00%
2013	20,40%	62,40%	17,20%	100,00%
2014	24,19%	55,85%	19,96%	100,00%
2015	22,77%	55,07%	22,14%	100,00%
2016	26,44%	63,40%	10,17%	100,00%
<b>Rata-rata</b>	<b>22,19%</b>	<b>62,32%</b>	<b>15,49%</b>	<b>100,00%</b>

Sumber : BKD Kota Cirebon

### **BAB III**

## **EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) SEMESTER I TAHUN 2017**

### **3.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) SEMESTER I TAHUN 2017**

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hasil evaluasi atas kebijakan rencana pembangunan, pelaksanaan pembangunan, dan hasil pelaksanaan pembangunan. Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Semester I Tahun 2017 mencakup telaahan terhadap evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Semester I Tahun 2017 tercantum dalam tabel 3.1 berikut:

## **3.2 PERMASALAHAN**

### **3.2.1 Permasalahan Bidang Pendidikan**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang pendidikan adalah:

1. Terlambatnya satuan pendidikan, UPTD, seksi dan bidang di lingkungan Dinas dalam pemenuhan data, baik untuk kebutuhan perencanaan (RKA/DPA) maupun pelaporan (laporan triwulanan, SKP, SPJ keuangan);
2. Terbatasnya sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas yaitu yang mempunyai pemahaman terhadap tupoksi, pengertian perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan juga penguasaan teknologi informasi;
3. Terlambatnya pengelola kegiatan dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan lainnya;
4. Terbatasnya sarana ruang/gedung pertemuan/aula Dinas/UPTD/satuan pendidikan sehingga mempengaruhi mutu pelayanan pendidikan yang bersifat sosialisasi maupun koordinasi;
5. Kurangnya koordinasi internal maupun eksternal dalam proses perencanaan pembangunan pendidikan.

### **3.2.2 Permasalahan Bidang Kesehatan**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang kesehatan adalah:

1. Sarana pelayanan belum semuanya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP).
2. Belum semua sarana pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan kesehatan terakreditasi.
3. Fasilitas pelayanan kesehatan belum seluruhnya dilengkapi dengan sarana pengolahan limbah.
4. Penyebaran tenaga profesional kesehatan belum merata, penempatan pegawai tidak sesuai dengan kompetensinya.
5. Belum semua penduduk miskin masuk dalam data kepesertaan program Jamkesmas atau Penerima Bantuan Iuran (PBI).

6. Belum optimalnya Sistem Informasi Kesehatan.
7. Belum seluruh puskesmas mempunyai sarana pengolahan limbah medis cair (hanya ada 2 puskesmas yang memiliki IPAL).
8. Belum mempunyai kendaraan operasional khusus penanggulangan bencana Bidang Kesehatan.
9. Masih ada perilaku masyarakat yang membuang air besar sembarangan (buangan akhirnya ke sungai).
10. Hasil konseling/kunjungan lapangan klinik sanitasi belum dapat diperbaiki dengan perbaikan rumah sehat.
11. Angka kesembuhan TBC di Kota Cirebon masih belum optimal.
12. Penyebaran penyakit HIV/AIDS cukup tinggi, prevalensi secara pasti belum diketahui.
13. Hampir sebagian besar wilayah Kota Cirebon merupakan daerah endemis DBD.
14. Kegiatan pemberantasan sarang nyamuk belum secara rutin dilaksanakan oleh masyarakat.
15. Pemahaman tentang penanggulangan penyakit masih kurang.
16. Kasus gigitan hewan masih ada.
17. Cakupan imunisasi masih rendah karena adanya pemahaman yang keliru dari masyarakat.
18. Kompleksitas pembuatan SOP yang tinggi sehingga memerlukan waktu yang panjang dalam pembuatan sesuai dengan PERMENPAN Nomor 35 tahun 2012
19. Penjadwalan penilaian akreditasi selalu berubah-ubah.
20. Tingkat kesibukan narasumber dari dinas kesehatan provinsi sangat tinggi, sehingga penetapan waktu penilaian akreditasi tidak sesuai.
21. Pembinaan akreditasi Puskesmas belum berjalan sesuai jadwal.
22. Masyarakat tidak mampu peserta BPJS banyak yang melahirkan. Meskipun ibunya peserta PBI namun bayinya tidak otomatis menjadi peserta BPJS dan dibiayai BPJS. Mereka tidak mampu untuk biaya perawatan bayinya.
23. Meskipun Jamkesda Kota Cirebon telah berhasil diintegrasikan menjadi peserta BPJS, namun masih ada masyarakat yang

tidak mampu dan tidak bisa didaftarkan ke BPJS karena tidak Terdaftar dalam SK Walikota yang diusulkan menjadi peserta BPJS.

24. Sampai saat ini Penghuni Lapas, Penghuni Panti, Gepeng dan penderita Thalasemia belum ada kejelasan siapa yang menjamin jaminan kesehatannya.
25. Masyarakat tidak mampu ada yang telah menjadi peserta BPJS secara mandiri karena kebutuhan mendesak ketika harus dirawat, namun drop out karena tidak mampu bayar pada bulan bulan berikutnya.
26. Maskin yang mengalami drop out tidak bisa dengan mudah diintegrasikan menjadi peserta PBI Daerah karena ternyata tunggakan iuran mereka harus dilunasi terlebih dulu ke BPJS.
27. Peserta PBI Kota banyak yang meninggal atau pindah karena dibiayai dari tempat bekerja atau ingin naik kelas perawatan.
28. Pengaduan masyarakat tentang ingin keluar BPJS karena menanggung tunggakan, padahal bukan karena tidak mau bayar namun karena berkali kali tidak bisa melakukan transaksi pembayaran karena mesin pembayaran error.
29. Surat tanda registrasi ( STR ) masih banyak yang belum selesai di MTKI
30. Belum terakomodirnya kebutuhan operasional Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Rumah Sakit dalam pembiayaan;
31. Kurangnya lahan untuk penambahan ruang radiologi dan laboratorium PA;
32. Kekurangan SDM pada semua instalasi di bawah Seksi Penunjang Diagnostik Analisis Kesehatan, Radiografer, Okupasiterapi;
33. Belum terealisasi alat MRI;
34. Kurangnya ruang tunggu rehabilitasi medis;
35. Kurangnya dokter radiology;
36. Kurangnya alat USG;
37. Terbatasnya RBA BLUD.

### **3.2.3 Permasalahan Bidang Pekerjaan Umum**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang pekerjaan umum adalah:

1. Banyaknya saluran yang tersumbat oleh endapan tanah di semua drainase perkotaan.
2. Terjadinya penyempitan alur sungai yang diakibatkan banyaknya endapan lumpur/gulma ditiap kali.
3. Pekerjaan galian jalan oleh instansi lain, pada akhir pengerjaannya kurang maksimal sehingga jalan mudah rusak.
4. Masih banyak trotoar yang belum berfungsi sebagaimana mestinya, karena masih digunakan oleh pedagang kaki lima.
5. Belum diinventarisasi kembali kondisi jembatan yang ada di Kota Cirebon.
6. Jembatan yang ada kurang perawatan karena keterbatasan anggaran (dana).
7. Masyarakat masih merasa kurang memiliki terhadap sarana jembatan, jalan dan saluran yang sudah dibangun sehingga tidak ikut memelihara sarana yang sudah ada.
8. Masih sulitnya penyediaan lahan yang harus dihibahkan tanpa ganti rugi.

### **3.2.4 Permasalahan Bidang Perumahan**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang perumahan adalah:

1. Masih lemahnya koordinasi antar Perangkat Daerah terkait program sanitasi.
2. Belum adanya Regulasi dari pemerintah kota yang 100% dapat menunjang kegiatan pelaksanaan Sanitasi yang optimal.
3. Kesadaran Masyarakat masih kurang terhadap arti pentingnya Sanitasi.
4. Kesadaran masyarakat masih kurang, terlihat banyaknya sampah yang dibuang ke saluran-saluran.

### **3.2.5 Permasalahan Bidang Penataan Ruang**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang penataan ruang adalah:

1. Upaya pengendalian pemanfaatan ruang kota belum didukung dengan Sistem Informasi yang memadai dan mudah untuk diakses oleh masyarakat secara umum baik secara digital maupun manual.
2. Keterbatasan SDM secara kuantitas dalam melaksanakan pengawasan pemanfaatan ruang.
3. Masih terdapat pemanfaatan ruang yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya adalah terkait dengan izin mendirikan bangunan.
4. Pelayanan penerbitan SKRK sebagai salah satu persyaratan dalam IMB belum didukung dengan system informasi yang berkelanjutan yang dapat menunjang upaya pemantauan pemanfaatan ruang.
5. Masyarakat masih belum sepenuhnya memahami pentingnya Rencana penataan ruang beserta pengaturannya

### **3.2.6 Permasalahan Bidang Perencanaan Pembangunan**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang perencanaan adalah:

1. Proses perencanaan belum sepenuhnya dipahami oleh Perangkat Daerah. Paradigma baru membutuhkan kerjasama dari seluruh OPD dengan koordinator Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon.
2. Pembagian tupoksi secara jelas dan tegas antara Kecamatan/ Kelurahan dan Dinas-dinas serta Kantor seringkali dijumpai usulan kegiatan yang serupa.
3. Ketersediaan data hasil kinerja dari Perangkat Daerah masih sulit didapatkan secara akurat.
4. Perencanaan penganggaran program/kegiatan belum sepenuhnya dititikberatkan pada pencapaian misi.

5. Masih dijumpai perencanaan program/kegiatan tahunan Perangkat Daerah yang tidak sinkron dengan perencanaan jangka menengahnya (Renstra).
6. Fungsi pengendalian pelaksanaan rencana belum berjalan optimal.

### **3.2.7 Permasalahan Bidang Perhubungan**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang perhubungan adalah:

1. Kurangnya manajemen keselamatan jalan
2. Kurangnya perlengkapan jalan yang berkeselamatan
3. Lemahnya kedisiplinan perilaku pengguna jalan
4. Lemahnya sistem penanganan korban pasca terjadinya kecelakaan
5. Kurangnya kualitas SDM Dinas Perhubungan yang handal dan Profesional
6. Pemanfaatan bahan bakar ramah lingkungan CNG sebagai bahan bakar alternatif untuk kendaraan bermotor
7. Angkutan masal perkotaan
8. Kesemerawutan lalu lintas pada ruas-ruas jalan CBD
9. Masih tingginya angka kecelakaan transportasi
10. Minimnya sarana prasana fasilitas LLAJ
11. Belum optimalnya pemanfaatan bandar udara dan pelabuhan
12. Optimalisasi pelaksanaan e-Government
13. OPD belum maksimal dalam memanfaatkan teknologi informasi sebagai peningkatan kinerja

### **3.2.8 Permasalahan Bidang Lingkungan Hidup**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang lingkungan hidup adalah:

1. Keterbatasan jumlah dan kompetensi teknis pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
2. Kelembagaan yang masih dalam bentuk kantor menjadikan keberadaan laboratorium masih berada di salah satu seksi

sehingga belum terbentuk UPTD tersendiri dan tenaga analis yang menangani laboratorium hanya satu orang.

3. Terbitnya undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dimana terdapat beberapa kewenangan yang perlu segera ditindaklanjuti seperti penyusunan KLHS, RPPLH, ijin lingkungan, penerapan sanksi pelanggaran lingkungan.
4. Kurangnya kesadaran dari pelaku usaha dalam upaya pengelolaan lingkungan.
5. Masih lemahnya penegakan hukum lingkungan karena terbatasnya jumlah PPLHD.
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.
7. Kesulitan dalam melakukan inventarisasi industri kecil karena letak dan lokasi yang tidak jelas, lokasi tanpa papan nama.
8. Masih banyak pelaku usaha yang belum mengurus perijinan limbah cair maupun B3 ke KLH.

### **3.2.9 Permasalahan Bidang Pertanahan**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang pertanahan adalah:

1. Keterbatasan Anggaran untuk pembebasan lahan bagi ruang terbuka hijau maupun tempat pembuangan sampah.
2. Pembebasan tanah masih sering dijumpai ada kendala.
3. Pengurusan sertifikat tanah milik pemerintah daerah masih terkendala karena beberapa tanah masih digunakan oleh warga.

### **3.2.10 Permasalahan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang Kependudukan dan Catatan Sipil adalah:

1. Terbatasnya kewenangan dinas untuk melakukan pengendalian kepada operator di kecamatan karena mereka bukan petugas dinas;

2. Belum adanya Petugas Registrasi di tingkat kelurahan, Status kepegawaian Petugas Registrasi yang berada di kelurahan masih menjadi pegawai di kelurahan belum pegawai Dinas sehingga kualitas kinerja yang diharapkan oleh Dinas belum terpenuhi (terutama pengelolaan dan penyajian data kependudukan di kelurahan untuk kepentingan Dinas)
3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Terbatasnya jumlah petugas yang memiliki kemampuan menjalankan Teknologi Informasi;
5. Terlalu cepat berubahnya peraturan pelaksanaan dan kebijakan pemerintah;
6. Belum akuratnya data kependudukan;
7. Belum sempurnanya aplikasi dan jaringan yang digunakan dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
8. Belum optimalnya sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat;
9. Belum tertatanya arsip kependudukan dan pencatatan sipil;
10. Pelayanan penerbitan KTP-el sering mengalami gangguan teknis yang mempengaruhi entry data (tidak berfungsinya database kependudukan Pusat, habisnya blanko KTP-el dan Pusat belum selesai melelangkan, terjadi data ganda);
11. Tidak adanya ruangan khusus pencetakan KTP-el yang membutuhkan spesifikasi khusus yaitu suhu ruang maksimum 16 derajat celcius dan tidak terganggu oleh aktifitas pelayanan dan tamu
12. Masyarakat seringkali datang langsung ke Dinas untuk memperoleh percepatan pelayanan administrasi kependudukan khususnya penerbitan KTP dan KK.

### **3.2.11 Permasalahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:

1. Terdapatnya ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender dengan adanya KDRT masih cukup tinggi
2. Ketidakakuratan data pengurus posyandu sehingga menyebabkan bantuan perasional ataupun bantuan lain seperti pengadaan seragam tidak tepat pendistribusiannya;
3. Kurangnya tenaga petugas dalam pelaksanaan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Terbatasnya dukungan sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan;
5. Masih kurangnya koordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Peningkatan Perkawinan pada usia dini.
7. Peningkatan resiko remaja dalam kesehatan reproduksi.

### **3.2.12 Permasalahan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah:

1. Belum tercapainya peserta KB Baru Pria jenis MOP sesuai target .
2. Jumlah petugas KB Lapangan masih kurang, jumlah Petugas Lapangan KB dan staf tidak sebanding dengan Frekuensi kegiatan KB-KS yang sangat banyak dan padat.
3. Masih banyaknya *grand multipara* (anak lebih dari 4).
4. Peningkatan Perkawinan pada usia dini.
5. Efek Samping Kontrasepsi yang perlu Pembiayaan.

### 3.2.13 Permasalahan Bidang Sosial

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang Sosial adalah:

1. Sarana dan prasarana Dinas, terutama mengenai status kepemilikan gedung yang terbatas dan masih menjadi sengketa menyebabkan kinerja menjadi kurang optimal, contohnya bantuan Provinsi mengenai pembangunan RPSA tidak dapat dilakukan di lahan yang sekarang ditempati Dinas;
2. Terbatasnya kuantitas SDM jika dibandingkan dengan rasio keluasan tugas-tugas dan permasalahan yang dihadapi yang mencakup bidang pembangunan kesejahteraan sosial, sehingga mempengaruhi efektifitas pelaksanaan tugas secara umum.
3. Jumlah PMKS yang ditangani sangat banyak, sedangkan belum terintegrasinya program dan kegiatan dengan Perangkat Daerah lain yang terkait serta belum kuatnya jaringan dengan stakeholder terkait, terutama dengan para Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. Selain itu, terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara jumlah PMKS yang ditangani dengan anggaran yang ada.
4. Selain program/kegiatan yang didanai oleh APBD Kota Cirebon, terdapat pula program/kegiatan yang didanai oleh APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN, padahal SDM pelaksana terbatas, sehingga tidak memadai untuk melaksanakan semua program/kegiatan;
5. Beberapa indikator sub kegiatan SPM mempunyai target nasional yang sangat tinggi, sehingga timbul kesulitan dalam pencapaiannya;
6. Belum memiliki sistem informasi/data yang terintegrasi, sehingga menyulitkan dalam pengumpulan/pengolahan dan analisis data, terutama mengenai PMKS
7. Masih banyak masyarakat yang belum memahami kriteria tentang pengusulan bantuan rumah roboh/rumah ambruk, sehingga terkesan bahwa terjadi bencana.

8. Masih terdapat perbedaan data tentang penerima bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
9. Minimnya sarana dan prasarana TAGANA.
10. Belum adanya Rumah Persinggahan/Perlindungan Sosial Anak.
11. Jumlah rumah tangga miskin masih belum terupdate

#### **3.2.14 Permasalahan Bidang Ketenagakerjaan**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang ketenagakerjaan adalah:

1. Belum tersedia instruktur PNS di UPTD Balai Latihan Tenaga Kerja (BLK) dan Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK).
2. Tidak semua peserta pemagangan langsung direkrut oleh perusahaan dikarenakan belum cocok dengan pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan.
3. Tidak tersampainya informasi tentang pelaksanaan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat.
4. Kurangnya kesadaran bagi para pencari kerja akan pentingnya mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan sebagai bekal ilmu ketika akan melamar pekerjaan maupun ketika akan berwirausaha.
5. Belum memiliki sistem informasi/data yang terintegrasi, sehingga menyulitkan dalam pengumpulan/pengolahan dan analisis data mengenai Ketenagakerjaan.
6. Meningkatnya jumlah pengangguran terbuka.
7. Migrasi penduduk desa ke perkotaan yang cukup tinggi.

#### **3.2.15 Permasalahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang koperasi dan usaha kecil menengah adalah:

1. Kualitas sumber daya manusia belum mencukupi dalam melaksanakan tupoksi.
2. Sering terjadi perubahan kebijakan pemerintah pusat dibidang Perdagangan dan Perindustrian akibat pengaruh kebijakan

internasional (globalisasi) yang belum dapat diikuti atau diteruskan di tingkat kebijakan daerah.

3. Belum adanya data potensi industri yang meningkat dan akurat sesuai dengan perkembangan kondisi lingkungan.
4. Industri Kecil Menengah (IKM) dalam melaksanakan inovasi teknologi dan sistem kerja masih lemah walaupun telah diberikan pelatihan.
5. IKM kurang berminat untuk menguji produknya karena masih dibutuhkannya inovasi akan pentingnya mutu produk IKM.
6. Waktu pengurusan sertifikat Merk HAKI di tingkat pusat yang relatif cukup lama lebih dari 6 bulan.
7. IKM belum optimal dalam memanfaatkan internet dan pameran sebagai media promosi.
8. Sebagian IKM kurang untuk memberikan data dan informasi ke petugas.
9. Sebagian IKM kurang terbuka untuk memberikan data perusahaan.
10. Perlunya peningkatan akses permodalan KUMKM.

### **3.2.16 Permasalahan Bidang Penanaman Modal**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang penanaman modal adalah:

1. Proses perijinan untuk investasi masih belum dapat dilaksanakan secara terpadu, sehingga masih menjadi hambatan bagi investor.
2. Masih kurangnya pegawai BPMPPT yang menguasai teknologi informasi khususnya petugas yang menangani jaringan sistem perijinan online, petugas admin sistem online dan petugas administrasi perijinan online (CS)
3. Belum sempurnanya software sistem informasi perijinan.
4. Belum optimalnya kemampuan SDM operator Sistem informasi perijinan.
5. Dalam rangka perijinan online, Perlu adanya pembenahan regulasi perijinan sebagai pedoman pelaksanaan perijinan disamping SP dan SOP

### **3.2.17 Permasalahan Bidang Kebudayaan**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang kebudayaan adalah:

1. Tuntutan terhadap perbaikan dan peningkatan infrastruktur serta pembinaan pelayanan kepada masyarakat di sektor budaya sangat kompleks. Dengan penurunan pagu maka hal ini menjadi masalah yang sulit dihindari.
2. Pembinaan dalam rangka menggugah peran aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian aset-aset budaya (Benda cagar budaya dan peninggalan sejarah kepurbakalaan) belum didukung dengan Peraturan Daerah tentang Perlindungan, pemeliharaan dan pengembangan kawasan situs/benda cagar budaya.

### **3.2.18 Permasalahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang kepemudaan dan olahraga adalah:

1. Dalam upaya meningkatkan prestasi olahraga di Kota Cirebon masih terkendala dengan minimnya dana yang dialokasikan. Untuk pembinaan olah raga dibutuhkan anggaran yang besar.
2. Pembagian kewenangan olah raga belum jelas antara KONI dan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata sehingga masih terjadi tumpang tindih kegiatan.
3. Sarana dan prasarana olahraga yang dimiliki oleh Kota Cirebon cenderung sedikit.
4. Salah satu kendala yang dihadapi dalam melakukan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan adalah minimnya data tentang jumlah organisasi kepemudaan di Kota Cirebon.
5. Kurangnya pemetaan kebutuhan program dalam pembinaan organisasi kepemudaan.

### **3.2.19 Permasalahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adalah:

1. Masih relatif terbatasnya kemampuan teknis yang dimiliki personil terutama dalam pelaksanaan pemahaman dan penjabaran berbagai kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Upaya pemberdayaan personil, baik pejabat dan staf pelaksana masih relatif sangat kurang.
3. Sistem koordinasi dalam melakukan kegiatan gabungan masih relatif kurang.
4. Sumber daya manusia yang ada masih perlu ditingkatkan pengetahuan dan kemampun teknisnya, guna meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon.
5. Koordinasi antar bidang masih perlu di tingkatkan guna meningkatkan keselarasan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dalam mencapai tujuan.
6. Belum adanya kesepakatan atau komitmen yang kuat dengan SKPD terkait yang memiliki Perda dalam hal pengawasan pengendalian mengantisipasi munculnya pelanggaran Perda serta upaya pembinaan pencegahan secara persuasif, sebelum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon melakukan upaya penertiban terhadap pelanggaran Perda.
7. Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon yang masih kurang memenuhi standar sesuai dengan Permendagri No. 60 Tahun 2012, tentang pedoman penetapan jumlah Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon masih kurang memadai.

### **3.2.20 Permasalahan Bidang Administrasi Pemerintahan**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang Administrasi Pemerintahan adalah:

1. Pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum berbasis kompetensi
2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang masih perlu ditingkatkan
3. Pelayanan administrasi kepegawaian belum optimal
4. Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi masih kurang
5. Sistem pengolahan data dan informasi kepegawaian belum optimal, sehingga pengolahan data kepegawaian masih seringkali dilaksanakan secara manual. Hal ini mengakibatkan sistem informasi data kepegawaian belum mampu disajikan secara akurat.
6. Disiplin Pegawai Negeri Sipil masih perlu ditingkatkan
7. Belum adanya kepastian dari Kemenpan RB terkait pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS baik dari formasi umum maupun eks honorer;
8. Belum adanya regulasi terkait tindak lanjut evaluasi bagi peserta Diklatpim Pola Baru yang tidak lulus;
9. Adanya usulan dari alumni peserta Diklatpim yang menyarankan diselenggarakan pembekalan penyusunan Proyek Perubahan sebelum diberangkatkan mengikuti Diklatpim. Hal ini dimaksudkan agar bahan/materi yang diperlukan untuk penyusunan Proyek Perubahan dapat dipersiapkan sebelumnya;
10. Banyaknya penawaran Diklat Teknis yang tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak tersedianya anggaran uang saku pada kegiatan diklat teknis;
11. Masih adanya berkas data pegawai yang belum lengkap, sehingga masih banyak pegawai yang belum memiliki file data pegawai secara lengkap;

12. Dalam tahap perencanaan terdapat kendala penetapan skala prioritas Bidang Pemadam Kebakaran terhadap isu-isu kebencanaan.
13. Kegiatan bidang Penanggulangan Bencana memerlukan sinergitas yang tinggi dengan berbagai stakeholder karena bersifat multidisiplin dan multisektoral

### **3.2.21 Permasalahan Bidang Ketahanan Pangan**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang ketahanan pangan adalah:

1. Lemahnya daya dukung dan daya tampung lembaga usaha ekonomi pedesaan dalam meningkatkan ketersediaan, distribusi dan akses pangan di daerah.
2. Lemahnya manajemen pengembangan dan ketersediaan cadangan pangan di tingkat rumah tangga.
3. Adanya daerah rawan pangan maupun daerah berpotensi terjadinya rawan pangan yang belum teridentifikasi dan diupayakan pemecahannya.
4. Pola konsumsi masyarakat yang masih berbasis pada beras menyebabkan komoditi beras bukan saja sebagai komoditi ekonomi melainkan menjadi komoditi politik.
5. Belum menjadi prioritas produsen pangan olahan untuk menghasilkan produk pangan yang bergizi, bermutu, sehat, aman dan halal.
6. Lemahnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan desa mandiri pangan yang berbasis pada budaya dan potensi lokal.
7. Lemahnya pengawasan keamanan dan mutu pangan terhadap produk pangan baik segar maupun olahan.

### **3.2.22 Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah:

1. Migrasi penduduk desa ke perkotaan cukup tinggi.

2. Kecenderungan menurunnya budaya gotong royong pada masyarakat desa dan perkotaan yang diindikasikan oleh rendahnya tingkat swadaya dan partisipasi dalam pembangunan.
3. Belum optimalnya kinerja pemerintahan Kelurahan.
4. Lemahnya tingkat keberdayaan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di Kelurahan.
5. Regulasi kebijakan pemerintah daerah belum didukung oleh kebijakan turunannya.
6. Terbatasnya pagu anggaran untuk melaksanakan kegiatan.
7. Kurangnya jumlah sumber daya manusia dan tenaga staf petugas lapangan.
8. Kurangnya partisipasi instansi terkait dan masih rendahnya partisipasi masyarakat.
9. Penyerahan SPJ dari LKK sering tidak tepat waktu.
10. Tidak terealisasinya pencairan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sejak Tahun 2013 sampai saat ini. Hal ini menyebabkan sulitnya memberikan penjelasan dan informasi pada masyarakat secara akurat karena tidak mempunyai bukti secara tertulis dari yang berwenang.
11. Tidak adanya ketentuan/pengaturan tentang batas waktu akhir pengiriman proposal usulan yang masuk menyebabkan masih ada sisa proposal yang belum disurvey Ued SP.

### **3.2.23 Permasalahan Bidang Statistik**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang statistik adalah:

1. Penyajian data sektoral belum sepenuhnya optimal karena ada beberapa sektor yang sulit memberikan data yang up to date.
2. BPS masih belum dapat menyajikan data tahun  $n$  di awal tahun  $n+1$ .

### **3.2.24 Permasalahan Bidang Kearsipan**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang kearsipan adalah:

1. Keterbatasan sumber daya manusia baik untuk tenaga pengelola kearsipan
2. Masih kurangnya kesadaran aparatur di masing-masing Perangkat Daerah terhadap pentingnya arsip vital untuk dikelola, sehingga untuk penarikan arsip mengalami hambatan, Arsip-arsip di tiap SKPD belum tertata dengan baik sehingga dalam penyerahan ke Bapusipda masih dalam keadaan belum tertata;
3. Sarana dan Prasarana Kearsipan belum memadai;
4. SDM pengelola Kearsipan yang ada di Perangkat Daerah belum sepenuhnya memiliki keterampilan di bidang Kearsipan.
5. Banyak arsip-arsip penting yang secara fisik telah rusak, memerlukan perawatan khusus.

### **3.2.25 Permasalahan Bidang Komunikasi dan Informatika**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang komunikasi dan informatika adalah:

1. Belum Optimalnya pelaksanaan e-Government
2. OPD belum maksimal dalam memanfaatkan teknologi informasi sebagai peningkatan kinerja

### **3.2.26 Permasalahan Bidang Perpustakaan**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang perpustakaan adalah:

1. Gedung bangunan baru Perpustakaan khususnya pada lantai dua masih belum optimal digunakan karena sarana dan prasarana belum ada.
2. Masih terbatasnya buku-buku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna perpustakaan.
3. Perlu peningkatan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas.
4. Sarana dan Prasarana baik Perpustakaan belum sepenuhnya terpenuhi.

### **3.2.27 Permasalahan Bidang Pertanian**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang pertanian adalah:

1. Luas lahan sawah dan lahan pertanian pada umumnya terus mengalami penurunan, sehingga perlu diambil langkah-langkah penyelamatan lahan dengan upaya untuk menciptakan lahan abadi, namun tentunya sangat membutuhkan dana yang cukup besar.
2. Belum optimalnya bimbingan penerapan standar pembibitan dan plasma nutfah.
3. Belum tertatanya kawasan peternakan yang representatif.
4. Belum optimalnya data potensi peternakan meliputi populasi, penyebaran dan pengembangan ternak serta produksi dan teknologi ternak.
5. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan petani tentang sistem jajar legowo dan penerapan penggunaan pupuk organik.
6. Masih sulitnya perilaku petani terutama dalam hal mengadopsi teknologi baru.

### **3.2.28 Permasalahan Bidang Kehutanan**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang kehutanan adalah:

1. Implementasi Undang-Undang no. 23 tahun 2014 membawa dampak pada kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah daerah kabupaten/kota berkenaan dengan kewenangan kawasan kelautan dan urusan kehutanan yang akan dikelola oleh provinsi.
2. Belum adanya pembinaan pengawasan peredaran dan pemantauan produksi benih di UPTD BPBTPH.
3. Tanaman khususnya tabulampot banyak yang layu diakrenakan musim kemarau yang panjang.
4. Masih kurangnya lahan yang akan digunakan untuk menanam pohon induk di UPTD BPBTPH.
5. Tidak tersedianya beberapa jenis tanaman tertentu di UPTD BPBTPH yang diminati masyarakat.

### **3.2.29 Permasalahan Bidang Pariwisata**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang pariwisata adalah:

1. Tuntutan terhadap perbaikan dan peningkatan infrastruktur serta pembinaan pelayanan kepada masyarakat di sektor budaya dan pariwisata sangat kompleks. Dengan penurunan pagu maka hal ini menjadi masalah yang sulit dihindari.
2. Sektor kepariwisataan belum menjadi prioritas perencanaan pembangunan daerah sebagai potensi andalan pendapatan asli daerah (PAD).
3. Minimnya anggaran untuk promosi pariwisata dan masih kurangnya dukungan dana untuk mengupayakan peningkatan penataan fasilitas dan daya tarik obyek wisata.

### **3.2.30 Permasalahan Bidang Kelautan dan Perikanan**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang kelautan dan perikanan adalah:

1. Implementasi Undang-Undang no. 23 tahun 2014 membawa dampak pada kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota berkenaan dengan kewenangan kawasan kelautan dan urusan kehutanan yang akan dikelola oleh provinsi.
2. Optimalisasi UPTD-UPTD di lingkup Dinas Kelautan Perikanan Peternakan dan Pertanian dan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) perlu lebih ditingkatkan seiring dengan sarana prasarana yang semakin representatif.
3. Masih perlunya pelatihan-pelatihan tentang budidaya perikanan yang ramah lingkungan.
4. Kurangnya sosialisasi intensif tentang cara penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan dan produk bahan dasar ikan.
5. Kurangnya sosialisasi tentang Permen no 1 Tahun 2015 mengenai penggunaan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan.
6. Masih perlunya validasi data perikanan.

7. Kurangnya informasi tentang pembudidaya ikan hias tentang penggunaan obat yang direkomendasikan kementerian kelautan dan perikanan.
8. Banyaknya Pemanfaatan sumberdaya ikan yang berlebih dan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

### **3.2.31 Permasalahan Bidang Perdagangan**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang perdagangan adalah:

1. Sumber daya pelaku usaha perdagangan masih lemah.
2. Pelaksana pengawasan pelaku usaha perdagangan yang kurang
3. Perkembangan Kota Cirebon sebagai Kota Perdagangan dan Jasa memungkinkan timbulnya dampak negatif yang berkaitan dengan sengketa pelaku usaha.
4. Krisis ekonomi global dan situasi ekonomi nasional menimbulkan gejolak harga kebutuhan masyarakat.
5. Masih sering ditemukannya produk barang dan jasa yang beredar tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
6. Masyarakat belum sepenuhnya mencintai produk dalam negeri.
7. Semakin kompetitifnya persaingan perdagangan baik dalam maupun luar negeri.
8. Perlu adanya Pendataan dan pendaftaran PKL.
9. Perlu adanya penyediaan ruang peruntukan bagi PKL baik menggunakan aset pemerintah maupun dengan kerjasama pihak ketiga.
10. Adanya pemberdayaan PKL melalui pembinaan dan bimbingan teknis, fasilitasi akses permodalan, penguatan kelembagaan, peningkatan jaringan dan promosi pemasaran.

### **3.2.32**

#### **Permasalahan Bidang Perindustrian**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang perindustrian adalah:

1. Kualitas sumberdaya manusia belum merata disetiap lininya.

2. Sering terjadi perubahan kebijakan pemerintah pusat dibidang Perdagangan dan Perindustrian akibat pengaruh kebijakan internasional (globalisasi) yang belum dapat diikuti atau diteruskan di tingkat kebijakan daerah.
3. Belum adanya data potensi industri yang meningkat dan akurat sesuai dengan perkembangan kondisi lingkungan.
4. Industri Kecil Menengah (IKM) dalam melaksanakan inovasi teknologi dan sistem kerja masih lemah walaupun telah diberikan pelatihan.
5. IKM kurang berminat untuk menguji produknya karena masih dibutuhkannya inovasi akan pentingnya mutu produk IKM.
6. Waktu pengurusan sertifikat Merk HAKI di tingkat pusat yang relatif cukup lama lebih dari 6 bulan.
7. IKM belum optimal dalam memanfaatkan internet dan pameran sebagai media promosi.
8. Sebagian IKM kurang untuk memberikan data dan informasi ke petugas.
9. Sebagian IKM kurang terbuka untuk memberikan data perusahaan.
10. Dibutuhkannya operasional Online SKA, NSW dan ASW dalam rangka kelancaran arus komoditi ekspor impor.
11. Perlunya penciptaan iklim usaha yang kondusif.
12. Adanya pembinaan teknis terhadap pelaku industri mikro, kecil dan menengah.



## **BAB. IV**

### **PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN**

#### **TAHUN 2017**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa dokumen perencanaan sebagai sebuah kesatuan dan disusun secara sistematis, berjenjang, dan mengikuti kaidah berkelanjutan. Rencana pembangunan tersebut disusun dari rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan jangka pendek (tahunan) yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kota Cirebon telah memiliki dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka menengah yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon 2005 – 2025 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013 – 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013 – 2018. Dokumen perencanaan tahunan wajib mengacu pada dokumen rencana pembangunan jangka menengah. Dalam bagian ini akan disampaikan bagaimana pencapaian target indikator makro sampai dengan tahun 2014 dan target indikator makro tahun 2015 dan tahun 2016 selain itu ditampilkan pula daftar prioritas program dan kegiatan perubahan tahun 2016 berdasarkan dokumen rencana pembangunan jangka menengah Kota Cirebon.

### **3.1 Target Indikator Makro 2017**

Indikator Makro merupakan kuantifikasi dari sasaran yang akan dicapai oleh pelaksanaan pembangunan selama satu tahun. Berdasarkan dokumen RPJMD Kota Cirebon Tahun 2013 – 2018 indikator makro yang akan dicapai dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**Tabel 4.1**  
**TARGET INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN**  
**TAHUN 2013 - 2018 RPJMD**

NO	INDIKATOR	TARGET					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,08	1	0,94	0,88	0,82	0,72
2	Proporsi Penduduk Miskin	10,88	10,67	10,46	10,25	10,34	9,83
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	57,17	56,82	57,27	57,82	58,37	58,92
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	10,18	9,99	9,8	9,6	9,42	9,23
5	Angka Partisipasi Murni SD	99,45	99,54	99,53	99,72	99,81	99,9
6	Angka Partisipasi Murni SLTP	96,07	96,25	96,43	96,61	96,79	96,79
7	Angka Partisipasi Murni SLTA	72,59	72,68	72,77	72,86	72,95	73,04
8	Angka Putus Sekolah Tingkat SD	0,63	0,58	0,53	0,48	0,43	0,38
9	Angka Putus Sekolah Tingkat SLTP	4,02	3,79	3,56	3,33	3,31	2,87
10	Angka Putus Sekolah Tingkat SLTA	37,29	36,88	36,47	36,06	36,65	36,24
11	Angka Harapan Hidup	68,56	68,58	68,6	68,62	68,64	68,66
12	Angka Melek Huruf	97,09	97,11	97,12	97,14	97,16	97,17
13	Pengeluaran Per Kapita	9,95	10,10	10,23	10,37	10,51	10,54
14	IPM	73,84	77,15	77,45	77,76	78,06	78,37

Sumber: RPJMD Kota Cirebon Tahun 2008-2013,



## 4.2 Daftar Prioritas Program dan Kegiatan Perubahan Tahun Anggaran 2017

Berdasarkan uraian terkait perubahan kebijakan pendapatan daerah, perubahan kebijakan belanja daerah dan perubahan kebijakan pembiayaan daerah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.1, maka anggaran yang bisa digunakan untuk belanja dan pembiayaan yang bersumber dari penambahan Pendapatan Daerah sebesar Rp164.885.589.757,00 dan penambahan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp44.792.566.650,00 sehingga secara keseluruhan anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp209.678.156.407,00.

Dari total anggaran sebesar Rp209.678.156.407,00 yang dialokasikan ke dalam belanja sesuai dengan kebutuhan SKPD yang telah diusulkan sebelumnya pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2017. Anggaran tersebut kemudian didistribusikan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel 2.2, daftar pagu indikatif Belanja Langsung SKPD sebagaimana tercantum dalam tabel 2.3 berikut, daftar rekapitulasi pagu indikatif per urusan SKPD dalam tabel 2.4, dan daftar usulan rencana perubahan program dan kegiatan per SKPD dalam tabel 3.1 di bawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Daftar Prioritas Program dan Kegiatan**  
**Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017**

No	Program Kegiatan	Jumlah	SKPD	Ket
<b>I</b>	<b>Belanja Fix Cost yang bersumber dari Penambahan Pendapatan</b>			
1	PAJAK ROKOK	7.000.000.000,00	Dinkes/RSD GJ	
2	Belanja CHT	2.100.000.000,00	Dinkes/RSD GJ	
3	Dana BOS APBN	40.065.200.000,00	Disdik	Perubahan Parsial
4	Belanja Penambahan Pendapatan BLUD	26.377.918.769,00	Dinkes/RSD GJ	
5	BANTUAN KEUANGAN	46.826.652.000,00	tersebar	Perubahan Parsial
	<b>Jumlah (I)</b>	<b>122.369.770.769,00</b>		
<b>II</b>	<b>Belanja Fix Cost yang bersumber dari SiLPA</b>			
1	Pembayaran Lanjutan Pekerjaan DAK Kelautan	905.450.000,00	DPPKP	
2	SiLPA DAK Kelautan dan Perikanan	476.991.003,00	DPPKP	
3	SiLPA JKN	3.523.376.250,00	Dinas Kesehatan	
4	SiLPA Bankeu 2016 (PBI)	3.159.441.000,00	Dinas Kesehatan	
5	SiLPA BLUD	3.897.081.231,00	Dinas Kesehatan/RSD GJ	
6	SiLPA DAK Tambahan	44.317.531.000,00	DPUPR	



No	Program Kegiatan	Jumlah	SKPD	Ket
<b>Jumlah ( II )</b>		<b>56.279.870.484,00</b>		
<b>III</b>	<b>Belanja Fix Cost Lainnya</b>			
1	Program Kegiatan BKD	1.000.000.000	BKD	
2	Penyelenggaraan Ujian Dinas	100.000.000	BKPPD	
3	Penyelenggaraan Diklat	237.000.000	BKPPD	
4	Kegiatan Jasa Komunikasi, Air, Telepon dan Listrik	25.800.000	BKPPD	
5	Kegiatan Sistem Informasi Kepegawaian	100.000.000	BKPPD	
6	Kegiatan Penghargaan dan Kasus-kasus	100.000.000	BKPPD	
7	Perbaikan ruang transit gedung korpri	100.000.000	BKPPD	
8	Kegiatan Kajian TPP Berbasis Kinerja	250.000.000	BKPPD	
8	Program dan Kegiatan BP4D	400.000.000	BPPPPD	
9	Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kabakaran dan PBD	1.000.000.000	Damkar	
10	Pensertifikasian TPI	100.000.000	DPPKP	
11	Pengembangan cadangan pangan	30.000.000	DPPKP	
11	Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan	350.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN	
12	DAK Bidang Kesehatan (Pengadaan Kendaraan Roda 2)	71.000.000	DINKES	Pengadaan Kendaraan Roda 2
13	DAK Bidang Kesehatan (Pembayaran DAK Pembangunan Puskesmas Cangkol)	708.686.400	DINKES	Pembayaran DAK Pembangunan Puskesmas Cangkol
14	Rehab Puskesmas Pesisir	220.000.000	DINKES	
15	BU Dak Kesehatan 2017	92.809.500	DINKES	
16	Kegiatan Jasa Komunikasi, Air, Telepon dan Listrik	90.000.000	DINKES	
17	Kegiatan Kota Sehat	50.000.000	DINKES	
18	Supporting Penyelenggaraan FKN	20.000.000	DINKES	
19	Penanganan PMKS (IT dan buffer stock)	75.000.000	DinsosPPPA	
20	Pengadaan Seragam SMPN 18	50.000.000	DISDIK	
21	Kegiatan BOP PAUD TKN Pembina	101.400.000	Disdik	Pengalihan dari Hibah
22	Pembayaran PJU	3.200.000.000	DISHUB	
23	Supporting Penyelenggaraan FKN	90.000.000	DISHUB	
24	Akreditasi Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	200.000.000	DISHUB	
24	Kemetrologian	300.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
25	Popkota	400.000.000	DKOKP	
26	Kegiatan FKN	881.000.000	DKOKP	
27	Kegiatan Sentra Gentala	200.000.000	DKOKP	



No	Program Kegiatan	Jumlah	SKPD	Ket
28	Sarana dan Prasarana Peny. FKN	1.000.000.000	DPUPR	
29	Rehabilitasi Rumdin Kejaksaan	1.000.000.000	DPUPR	
30	Supporting Smart City	2.000.000.000	DKIS	
31	Penyelenggaraan Informasi Komunikasi dan Surat Kabar	500.000.000	DKIS	
32	Publikasi Penyelenggaraan FKN	125.000.000	DKIS	
33	Supporting Penyelenggaraan FKN	30.000.000	DLH	
34	Supporting Pelayanan PTSP	150.000.000	DPMPPTSP	
35	Penghargaan Manggala Karya Kencana (DPPKB)	50.000.000	DPPKB	
36	Kegiatan DPPKB	150.000.000	DPPKB	
37	Program Kegiatan DPRKP ( untuk mewujudkan visi RAMAH)	1.000.000.000	DPRKP	untuk mewujudkan visi RAMAH
38	Program dan Kegiatan DPUPR	700.000.000	DPUPR	
39	Rehab aula Inspektorat	200.000.000	DPUPR	
40	Kegiatan RDTR	100.000.000	DPUPR	
41	Biaya Umum DAK Tambahan	100.000.000	DPUPR	
42	Supporting Pengawasan	450.000.000	Inspektorat	
43	Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	300.000.000	Kesbang	
44	Program dan Kegiatan Satpol PP	100.000.000	POLPP	
45	Penyertaan Modal BJB	1.516.344.000	PPKD	
46	Belanja Hibah	9.065.803.950	PPKD	
47	Pengadaan Mobil Jabatan (KPU)	350.000.000	Setda	
48	Kegiatan Pospedawil	75.000.000	Setda	
49	Kegiatan TEPR	75.000.000	Setda	
50	TAL, pamdal, OB SETDA, dan Kegiatan Setda	4.100.000.000	SETDA	
51	Kegiatan Cirebon Bershalawat	200.000.000	Setda	
52	Program dan Kegiatan Set. DPRD	5.000.000.000	Set. DPRD	
53	Kajian penetapan besaran sewa rumah	50.000.000	Setda	
54	Program Kegiatan Disdukcapil	100.000.000		
	<b>JUMLAH (III)</b>	<b>31.028.515.154,00</b>		
	<b>TOTAL FIX COST (I+II+III)</b>	<b>209.678.156.407,00</b>		

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah, 2017



## BAB V PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 memuat arah kebijakan pembangunan, arah kebijakan keuangan daerah, dan rencana perubahan prioritas program dan kegiatan tahun 2017. Perubahan RKPD Tahun 2017 ini sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 285 ayat (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.

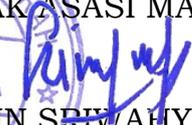
Sejalan dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kota Cirebon diharuskan untuk menyesuaikan dan menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan SKPD.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 diharapkan prioritas pembangunan sebagai penjabaran dari visi dan misi dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,  
  
YUYUN SRIWAHYUNI P  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19591029 198603 2 007

**Evaluasi Terhadap Hasil RKPD  
Pemerintah Daerah Kota Cirebon  
Tahun 2017**

**Sasaran Pembangunan**

1. Meningkatkan implementasi nilai keimanan dan ketaqwaan pada aparatur pemerintahan
2. Meningkatnya kualitas sarana prasarana keagamaan
3. Terwujudnya prestasi Kota Cirebon dalam bidang keagamaan
4. Terciptanya suasana kerukunan hidup antar umat beragama yang harmonis dan saling menghargai
5. Terwujudnya aparatur daerah yang memiliki integritas dan profesional
6. Terwujudnya tertib administrasi keuangan perangkat daerah
7. Terwujudnya tertib administrasi perencanaan perangkat daerah
8. Terwujudnya tertib administrasi kearsipan daerah
9. Terwujudnya pelayanan prima dalam perijinan
10. Meningkatnya pertumbuhan nilai investasi
11. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan
12. Terwujudnya sarana dan prasarana organisasi perangkat daerah yang
13. Terwujudnya hubungan pemerintahan dan masyarakat yang harmonis
14. Tercapainya kesepakatan penetapan batas daerah dengan Kabupaten Cirebon
15. Terwujudnya penataan sistem manajemen dan proses kinerja dilingkungan pemerintah kota dengan
16. Terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam ke-Bhineka Tunggal Ika-an
17. Terwujudnya masyarakat yang sadar hukum
18. Terwujudnya RW K-3
19. Menurunnya titik rawan kemacetan dan kecelakaan
20. Tertatanya sektor informal
21. Meningkatnya daya tanggap terhadap bencana
22. Terbukanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan
23. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
24. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
25. Terwujudnya prestasi olah raga di tingkat propinsi
26. Meningkatnya jumlah pusaka budaya yang dilestarikan
27. Meningkatnya indeks daya beli masyarakat
28. Menurunnya jumlah KK miskin
29. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
30. Tercapainya peningkatan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial
31. Terpenuhinya kesetaraan gender
32. Meningkatnya Proporsi Pembiayaan Pembangunan yang berasal dari
33. Meningkatnya Nilai Swadaya Masyarakat dalam Stimulan / Bantuan RW
34. Meningkatnya luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau publik dan privat
35. Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup
36. Meningkatnya pengelolaan sampah dan sumber sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan
37. Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat
38. Tersedianya sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya
39. Tersedianya sistem pengelolaan jaringan air limbah domestik secara optimal
40. Tersedianya Sistem Pengelolaan Air Minum
41. Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten
42. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan
43. Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni
44. Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11 = 5+9		12 = 11/4x100%		13
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar																				
1.01	Bidang Pendidikan																				
1.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Minimal 1 PAUD tiap RW	100%	4,978,000,000	78.54%	1,247,078,950	91%	1,499,456,750	0.00	0.00	0.00	338,813,500.00	0%	338,813,500.00	0%	22.60%	0%	1,585,892,450	0%	32%	Dinas Pendidikan
1.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			149,290,140,200		51,054,995,548		32,612,363,856				3,579,403,855		3,579,403,855	0%	10.98%		71,924,270,153	0%	48%	Dinas Pendidikan
		APK SD/MI	100%		110.54%		100%		0.00	0.00	0.00	0.00%	0%		110.54%		110.54%				
		APM SD/MI	100%		95.53%		100%		0.00	0.00	0.00	0.00%	0%		95.53%		95.53%				
		APS SD/MI	0%		0.02%		0.01%		0.00	0.00	0.00	0.00%	0%		0.02%		0.02%				
		APK SMP/MTS	100%		119.00%		100%		0.00	0.00	0.00	0.00%	0%		119.15%		119.15%				
		APM SMP/MTS	100%		83.12%		98.98%		0.00	0.00	0.00	0.00%	0%		83.12%		83.12%				
APS SMP/MTS	0%		0.25%		0.01%		0.00	0.00	0.00	0.00%	0%		0.25%		0.25%						
1.01.17	Program Pendidikan Menengah			227,538,572		22,499,079,081		44,087,710,000							0.00%	0.00%				0%	Dinas Pendidikan
		APK SMA	96.00		83.68%		93.08%		0.00	0.00	0.00	0.00%	0%		0.00		0.00%				
		APM SMA	65.00		39.43%		62.76%		0.00	0.00	0.00	0.00%	0%		0.00		0.00%				
		APS SMA	0.00		0.11%		0.03%		0.00	0.00	0.00	0.00%	0%		0.00		0.00%				
		APK SMK	78.00		55.71%		74.62%		0.00	0.00	0.00	0.00%	0%		0.00		0.00%				
		APM SMK	52.00		55.68%		58.39%		0.00	0.00	0.00	0.00%	0%		0.00		0.00%				
APS SMK	0.00		0.10%		0.20%		0.00	0.00	0.00	0.00%	0%		0.00		0.00%						
1.01.18	Program Pendidikan Non Formal	Prosentase penduduk melek huruf usia 10 tahun keatas	97.19	12,228,000,000	99.98	984,795,020	95%	1,292,993,050	0.00	0.00	0.00	402,247,285.00	99.98%	402,247,285.00	105.24%	31.11%	99.98	1,387,042,305.00	103%	11%	Dinas Pendidikan
1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D4	100%	4,140,000,000	90.68%	284,500,000	95%	1,235,999,900	0.00	0	0.00	109,413,400	90.68%	109,413,400.00	95%	8.85%	91%	393,913,400	91%	10%	Dinas Pendidikan
		Guru SD/MI yang memenuhi sertifikasi tenaga pendidik	92.00		47.65%		84.22%		0.00	0.00	0.00	47.65%		95%		47.65%		1%			
		Guru SMP/MTS yang memenuhi kualifikasi S1/D4	100.00		92.55%		98.05%		0.00	0.00	0.00	0.00		95%		0.00		0%			
		Guru SMP/MTS yang memenuhi sertifikasi tenaga pendidik	77.00		45.84%		72.32%		0.00	0.00	0.00	0.00		95%		0.00		0%			
		Guru SMA/SMK/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D4	100.00		95.54%		99.41%		0.00	0.00	0.00	0.00		95%		0.00		0%			
		Guru SMA/SMK/MA yang memenuhi sertifikasi tenaga pendidik	82.00		37.71%		76.40%		0.00	0.00	0.00	0.00		95%		0.00		0%			
1.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Indeks kepuasan Layanan	85%	2,642,734,000	82%	952,256,750	83%	1,510,280,000	0.00	0.00	82%	253,329,100.00	82%	253,329,100.00	95%	16.77%	82.00%	1,205,585,850	96%	46%	Dinas Pendidikan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1.01.30	Program peningkatan akses pendidikan bagi keluarga miskin	Rasio siswa gakin yg memperoleh pendidikan / jumlah siswa gakin	90%	48,214,000	100%	0.00	90%	9,700,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	95%	0.00%	0	0	0%	0%	Dinas Pendidikan
Rata-rata capaian kinerja (%)															39.33%	12.90%			31.78%	20.93%	
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
<b>1.02 Bidang Kesehatan</b>																					
1.02.16	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	95%	1,564,919,000	93.37%	241,974,000	93%	892,718,300	20.82	6,978,000.00	40.69	17,014,500	61.51%	23,992,500	66.14%	3%	61.51%	265,966,500	64.75%	17.00%	Dinas Kesehatan
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95%		95.13%		93%		19.62		43.76		63.38%		68.15%		63.38%		66.72%		
		Cakupan pelayanan nifas	91%		92.83%		91%		19.8	-	42.7	-	62.49%		68.67%		62.49%		68.67%		
1.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan Siaga Aktif	75%	1,455,000,000	100%	276,117,500.00	55%	260,000,000	-	-	46.28	138,832,400	46.28%	138,832,400	84.15%	53%	46.28%	414,949,900	61.71%	28.52%	Dinas Kesehatan
		Jumlah KK ber PHBS	75%		65%		70%		-	-	-	-	0.00%		0.00%		65.00%		86.67%		
1.02.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	95%	2,282,118,000	90.91%	1,309,871,845	90%	805,068,000	0.00	66,027,500.00	0.00	150,045,500.00	0.00%	216,073,000	0.00%	27%	90.91%	1,525,944,845	95.69%	66.87%	Dinas Kesehatan
		Penemuan Kasus AFP	6 orang		7 orang		5 orang		0.00		0.00		0.00%		0.00%		7 orang		116.67%		
		Kesembuhan penderita TBC BTA Positif	85%		73.75%		80%		61.76		37.30		99.06%		123.83%		99.06%		116.54%		
		Cakupan balita dengan Pneumonia yang diobati	91%		100%		89%		53.50		49.65		103.15%		115.90%		103.15%		113.35%		
		Penderita DBD yang ditangani	100%		100%		100%		100.00		100.00		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		
		Penemuan dan Penanganan penderita diare	100%		100%		100%		30.00		20.02		50.02%		50.02%		50.02%		50.02%		
		Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%		100%		100%		100.00		100.00		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		
1.02.24	Program upaya kesehatan masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	100%	46,235,094,660	100%	24,845,192,933	100%	32,337,063,176.00	30.00	2,990,316,541.00	30%	5,473,171,134	60%	8,403,487,675.00	60.00%	26%	60%	33,248,680,608	60.00%	71.91%	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		PD Penanggung jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									K	Rp	K	Rp										
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%		110.32%			80%		24.99		52.06%		77.05%		96.31%		77.05%		77.05%		
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	84%		113.86%			80%		24.61		50.68%		75.29%		94.11%		75.29%		89.63%		
		Cakupan kunjungan bayi	91%		92%			88%		29.94		75.64%		105.58%		120%		105.58%		116%		
		Cakupan pelayanan anak balita	92%		89.70%			90.00%		21.37		61.58%		82.95%		92.17%		82.95%		90.16%		
		Cakupan peserta KB aktif	78%		61.65%			77%		60.73		60.81%		60.73%		78.87%		60.73%		77.86%		
		Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100%		96.11%			100%		96.11		96.11%		96.11%		96.11%		96.11%		96.11%		
		Presentase kualitas air minum memenuhi syarat	99%		97.33%			98.00%		0.00		0%		0%		0.00%		0%		0.00%		
1.02.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Rumah Sakit Pendidikan Kesehatan Skala Penuh	RS Pendidikan Utama	2,000,000,000	0%	1,510,007,350	RS Pendidikan Utama	500,000,000	0%	-		0%		0%		0%		-		0%		Dinas Kesehatan
1.02.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	100%	7,371,000,000	74.50%	1,510,007,350	100%	1,653,750,000	20.00%	203,935,000	55.00%	305,902,500	75.00%	509,837,500	75.00%	31%	75.00%	2,019,844,850	75.00%	27.40%		Dinas Kesehatan
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%		100%		100%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%			
1.02.33	Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan	Tercapainya Pelayanan Kesehatan Lanjutan di RSUD Gunung Jati sesuai SPM Rumah Sakit yang meliputi :		1,566,233,000		208,308,203,270	0.00%	324,366,000,000.00	0.00%	55,223,713,038	0.00%	114,068,691,568	0.00%	169,292,404,606	0.00%	52%	-	169,292,405	0.00%	11%		Dinas Kesehatan
		Pelayanan gawat darurat	100%		98%		95%		-		-		-		0.00%					0.00%		
		Pelayanan rawat jalan	100%		100%		96%		-		-		-		0.00%					0.00%		
		Pelayanan rawat inap	100%		100%		94%		-		-		-		0.00%					0.00%		
		Pelayanan bedah	100%		100%		97%		-		-		-		0.00%					0.00%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		PD Penanggung jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									K	Rp	K	Rp										
		Pelayanan persalinan dan perinatologi	100%		90%		98%		-		-		-		0.00%				0.00%			
		Pelayanan intensif	100%		100%		95%		-		-		-		0.00%				0.00%			
		Pelayanan Radiologi	100%	1,495,380,000	100%	191,586,000.00	100%		-		-		-		0.00%				0.00%			
		Pelayanan Radiologi Patologi Klinik	100%	549,810,000	99.80%	59,660,000.00	100%		-		-		-		0.00%				0.00%			
		Pelayanan Rehabilitasi Medik	100%	439,810,000	100%	63,155,000.00	100%		-		-		-		0.00%				0.00%			
		Pelayanan farmasi	100%	1,559,681,000	100%	68,645,000.00	100%		-		-		-		0.00%				0.00%			
		Pelayanan gizi	100%	1,539,450,000	96.70%	137,199,500.00	100%		-		-		-		0.00%				0.00%			
		Pelayanan transfusi darah	100%		100%		99%		-		-		-		0.00%				0.00%			
		Pelayanan keluarga miskin	100%		100%		99%		-		-		-		0.00%				0.00%			
		Pelayanan rekam medis	100%		87.69%		100%		-		-		-		0.00%				0.00%			
		Pengolahan limbah	100%		100%		100%		-		-		-		0.00%				0.00%			
		Pelayanan ambulans/kereta jenazah	100%	1,200,916,705	100%	87,455,000.00	100%		-		-		-		0.00%				0.00%			
		Pelayanan pemulasaraan jenazah	100%	378,515,000	100%	54,835,500.00	100%		-		-		-		0.00%				0.00%			
		Pelayanan laundry	100%	475,000,000	85%	0.00	100%		-		-		-		0.00%				0.00%			
		Pencegah pengendalian infeksi	100%		80%		90%		-		-		-		0.00%				0.00%			
1.02.24	Program Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Keluarga Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan keluarga miskin 100%	100%	26,489,031,186	100.00	19,436,381,899	100%	15,000,000,000	98	3,908,219,784	98%	5,186,257,519	100%	9,094,477,303	100%	61%	100%	28,530,859,202	100%	108%	Dinas Kesehatan	
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>															37.54%	32%			42.72%	41%		
<b>Predikat Kinerja</b>															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
<b>1.03 Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>																						
1.03.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota 100%	100%	72,500,000,000	95%	103,946,962,500	98%	26,918,356,400.00	0.00%	0.00	41.00%	10,912,943,000.00	41.00%	10,912,943,000.00	42%	41%	136%	114,859,905,500	136%	158%	Dinas PU dan Penataan Ruang	
1.03.16	Program Pembangunan Saluran Drainase Primer dan Sekunder	Tersedianya system jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan	10 titik	27,000,000,000	90%	0.00	95%	1,000,000,000.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0%	0%	90%	0	0%	0%	Dinas PU dan Penataan Ruang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1.03.18	Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan	100%	5,000,000,000	97%	13,074,000,000	98%	971,000,000.00	0.00%	0.00	58.00%	566,751,000.00	58.00%	566,751,000.00	59%	58%	155%	13,640,751,000	155%	273%	Dinas PU dan Penataan Ruang
1.03.26	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Meningkatnya media resapan, terbangunnya kolam retensi/embung	2 titik	10,000,000,000	90%	5,116,347,000.00	2 titik	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0%	0%	90%	5,116,347,000	90%	51%	Dinas PU dan Penataan Ruang
1.03.28	Program pengendalian banjir	Terpeliharanya bantaran dan tanggul sungai	100%	8,800,000,000	100%	2,117,964,500.00	100%	1,695,092,400.00	0.00%	0.00	0.00%	1,273,845,000.00	0.00%	1,273,845,000.00	0%	0%	100%	3,391,809,500	100%	39%	Dinas PU dan Penataan Ruang
1.03.41	Program Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase primer dan sekunder	Meningkatnya kondisi saluran drainase primer dan sekunder dalam kondisi baik	100%	8,000,000,000	100%	3,401,010,018	100%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0%	0%	100%	3,401,010,018	100%	43%	Dinas PU dan Penataan Ruang
1.03.45	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah	Meningkatnya Cakupan pelayanan air limbah 100%	65%	3,000,000,000	98%	0.00	98%	858,525,000.00	0.00%	0.00	0.00%	187,525,000.00	0.00%	187,525,000.00	0%	0%	98%	187,525,000	151%	6%	Dinas PU dan Penataan Ruang
1.03.46	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih perpipaan	80%	3,000,000,000	4%	0.00	6%	125,620,000.00	0.00%	0.00	0.00%	14,960,000.00	0.00%	14,960,000.00	0%	0%	4%	14,960,000	5%	0%	Dinas PU dan Penataan Ruang
1.03.47	Program peningkatan akses pelayanan air bersih, sanitasi, dan listrik bagi keluarga miskin	Rasio KK miskin rata-rata yg memperoleh akses pelayanan / jumlah KK miskin	30%	3,500,000,000	15%	150,000,000.00	25%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0%	0%	15%	150,000,000	50%	4%	Dinas PU dan Penataan Ruang
1.03.57	Program penataan bangunan dan lingkungan	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dan masyarakat yang optimal	80%	26,000,000,000	100%	56,542,865,102	100%	76,818,188,065.00	0.00%	0.00	0.00%	5,101,874,000.00	0.00%	5,101,874,000.00	0%	0%	100%	61,644,739,102	125%	237%	Dinas PU dan Penataan Ruang
1.03.17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terlayannya masyarakat dalam proses perijinan selama 12 hari kerja dan terkendalinya pemanfaatan ruang Kota Cirebon	100%	1,350,000,000	100%	469,835,000	100%	484,127,400	0.00%	0.00	0.00%	74,646,250.00	0.00%	74,646,250.00	0%	0%	100%	544,481,250	100%	40%	Dinas PU dan Penataan Ruang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
1.03.18	Program Penyediaan Sistem Informasi Pengendalian Tata Ruang	Tersedianya sistem informasi 100%	100%	750,000,000	60%	0.00	80%	114,650,000	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0%	0%	60%	0	60%	0%	Dinas PU dan Penataan Ruang
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>															8.42%	8.24%			89.31%	70.99%	
<b>Predikat Kinerja</b>															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
<b>1.04 Bidang Perumahan</b>																					
1.04.15	Program Pengembangan Perumahan	Menurunnya rumah tidak layak huni (rumah)	16,256.00	0.00	16,806.00	173,371,000	16,696	4,100,000,000.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	16,806	173,371,000	103%	0%	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman
1.04.16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Berkurangnya kawasan lingkungan permukiman kumuh 3,21 % menjadi 0,46%	17,52 ha (0,46%)	8,000,000,000	1.84%	184,175,000	52,59 ha (1,38%)	1,500,000,000.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1.84%	184,175,000	400%	2%	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman
1.04.25	Program Penataan Kawasan Perumahan Keluarga Miskin	Rasio KK Miskin yang memperoleh bantuan perbaikan / Jumlah KK miskin	30%	10,000,000,000	0.00%	0.00	25%	2,500,000,000	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0%	0%	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>															0.00%	0			0.00%	0	
<b>Predikat Kinerja</b>															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
<b>1.05 Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>																					
1.19.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah RW yg melaksanakan siskamling	50%	532,622,000	85 RW (34,4%)	1,348,225,620	30%	456,020,000.00	30%	81,710,000.00	30%	71,260,000.00	60%	152,970,000.00	200%	34%	94%	1,501,195,620	189%	282%	Satpol PP
		Jumlah tenaga linmas tiap RT	1358/1358	293,000,000	1330/1358		1340/1358	266,000,000.00	1,340 orang /1.358 RT (18 orang)		1,340 orang /1.358 RT (18 orang)		1,340 orang /1.358 RT (18 orang)	100%		1,340 orang /1.358 RT (18 orang)	100%				
1.19.17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah PNS, pelajar dan mahasiswa yang memperoleh pembinaan wawasan kebangsaan	4500 orang (900 orang/tahun)	8,400,000,000	89.13	317,693,699	100	111,687,500.00	85.37	53,827,500.00	15.89	15,575,450.00	101.26	69,402,950.00	101%	62%	73.85	387,096,649.00	89.63%	5%	Kesbangpoldagri
1.19.19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah kader masyarakat bidang kantrantibmas	500 orang (100 orang/th)	418,027,500	100 orang	399,758,350	400 orang	380,025,000.00	0.00	22,980,000.00	0.00	21,235,000.00	0.00	44,215,000.00	0%	12%	100 orang	443,973,350	20%	106%	Satpol PP
1.19.20	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya frekuensi patroli lingkungan 3 kali/hari	3 kegiatan	1,660,882,300	3 kegiatan	747,766,400.00	3 kegiatan	1,460,718,000	0.00	134,104,000	0.00	285,740,000	0.00	419,844,000.00	100%	29%	3 kegiatan	1,167,610,400	100%	70%	Satpol PP

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		PD Penanggung jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									K	Rp	K	Rp										
1.19.25	Program Penegakan Peraturan Daerah	Penurunan jumlah kasus pelanggaran Perda dari 10 menjadi 5 kasus	5 kasus	940,443,350	15 kasus	237,342,300.00	3 kegiatan	847,238,500.00	0.00	0.00	3 kegiatan	139,458,750.00	3 kegiatan	139,458,750.00	100%	16%	3 kegiatan	376,801,050	100%	40%	Satpol PP	
1.20.37	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah aparaturnya dan masyarakat di tingkat Kelurahan yang dilatih 300 orang /tahun	2100 orang	1,800,000,000	150 orang	9,725,466,750	300 orang	31,350,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	9,725,466,750	0%	540%	Dinas Pemadam Kebakaran	
1.20.43	Program Peningkatan Kapasitas Petugas Pemadam Kebakaran	Prosentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi 100%	100%	400,000,000	20%	0.00	50%	200,000,000.00	0.00	0.00	50.00	200,000,000.00	50%	200,000,000.00	100%	100%	70%	200,000,000	18%	50%	Dinas Pemadam Kebakaran	
1.20.42	Program Kerukunan Umat Beragama	Kasus bernuansa SARA	0 kasus	500,000,000	0 kasus	391,795,600	0 kasus	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 kasus	0.00	0%	0%	0 kasus	391,795,600	0%	78%	Kesbangpolda gri	
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>															77.92%	31.57%			68.49%	146.46%		
<b>Predikat Kinerja</b>															Sedang	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Tinggi		
<b>1.06</b>	<b>Bidang Sosial</b>																					
1.13.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar	80%		10.80%	657,687,475	80%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0	0	0	Dinas Sosial PP & PA		
		PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	80%		14.57%		80%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0	0	0			
		Panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	80%		77.78%		80%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0	0	0			
		Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	60%		0%		60%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0	0	0			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		PD Penanggung jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									K	Rp	K	Rp										
		Penyanggah cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	40%		10.83%		40%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0%	0%	0	0	0	
1.13.24	Program Penguatan Jejaring kemitraan dalam rangka penanganan PMKS	Jumlah Potensi Sumberdaya Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	12 PSKS (100%)	3,700,000,000	8 PSKS (66,67%)	0.00	11 PSKS (91,67%)	760,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00%	Dinas Sosial PP & PA
		Jumlah MOU kemitraan dalam penanganan PMKS	12 MOU (100%)		0%		11 MOU (91,6%)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00%	
1.13.25	Program Penanggulangan Korban Bencana	Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	6,900,000,000	0.00	0.00	100%	1,530,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00%	Dinas Sosial PP & PA
		Korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	80%		0.00	0.00	80%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00%	
1.13.26	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Peningkatan keterampilan tenaga pengurus panti asuhan/jompo	100%	0	3%	0.00	85%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00%	Dinas Sosial PP & PA	
Rata-rata capaian kinerja (%)															0.00%	0.00%			0.00%	0.00%		
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
<b>2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>																						
<b>2.01 Bidang Tenaga Kerja</b>																						
2.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Standar BLK	Terdaftar	4,490,000,000	Belum terdaftar	152,907,150	Terdaftar	2,400,000,000	Belum terdaftar	20,271,000.00	0.00	0.00	Belum terdaftar	20,271,000.00	0%	1%	Belum terdaftar	173,178,150.00	0.00%	3.86%	Dinas Tenaga Kerja	
		Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75%		84.75%		75%		50%					50.00%		66.67%		50.00%		66.67%		
		Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	60%		0%		60%		0%					0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
2.01.18	Program Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	24%	1,187,000,000	45.29%	98,686,750	12%	555,000,000.00	31.61%	14,760,000.00	0.00	0.00	31.61%	14,760,000.00	263.42%	3%	31.61%	113,446,750.00	131.71%	9.56%	Dinas Tenaga Kerja
2.01.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	50%	2,415,000,000	0.00%	0.00	50%	1,150,000,000	100.00%	35,560,000.00	0.00	0.00	100%	35,560,000.00	200.00%	3%	100%	35,560,000.00	200.00%	1.47%	Dinas Tenaga Kerja
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>															106.02%	2.20%			79.68%	2.98%	
<b>Predikat Kinerja</b>															Sangat tinggi	Sangat Rendah			Sangat tinggi	Sangat Rendah	
<b>2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>																					
2.02.18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Rasio gender di atas 30% perempuan	10 dinas/instansi	700,000,000	0.00%	0.00	2 dinas/instansi	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	40%	0	0%	0	0%	0	Dinas Sosial PP & PA
2.02.21	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio RW layak anak per kelurahan	6 RW	750,000,000	0.00	99,900,000	2 RW	175,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0	0	0	0%	0	Dinas Sosial PP & PA
2.02.22	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender & Anak	Pengarusutamaan gender melalui peringatan hari besar perempuan	1125/1700 orang	1,050,000,000	690 orang	88,395,900	225/350 orang	200,000,000.00	0.00	0.00	28.64	17,837,500.00	28.64	17,837,500.00	45%	8.92%	28.64	17,837,500.00	43%	2.84	Dinas Sosial PP & PA
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>															42.50%	2.97%			14.33%	0.94%	
<b>Predikat Kinerja</b>															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
<b>2.03 Bidang Pangan</b>																					
2.03.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan energi dan protein perkapita	1.980 k.klri/hr 51.2gr/h (90%)	1,035,000,000	90.00%	845,972,000	90.00%	789,953,000.00	0.00	15,340,000.00	0.00	29,990,000.00	0%	45,330,000.00	0%	5.74%	90%	891,302,000.00	100%	86%	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
		Penguatan cadangan pangan	60%		49.83%		60%		0.00		0.00		0%		0%		50%		83%		
		Ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan di daerah	90%		100%		90%		0.00		0.00		0%		0%		100%		111%		
		Stabilisasi harga dan pasokan pangan	90%		100%		90%		0.00		0.00		0%		0%		100%		111%		
		Penanganan daerah rawan pangan	90%		100%		90%		0.00		0.00		0%		0%		100%		111%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
									K	Rp	K	Rp											
2.03.17	Program Pengembangan Pengendalian dan Keamanan Pangan	Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan	90 poin	300,000,000	85,91 poin%	208,696,000.00	87 poin	215,355,000.00	0.00	2,423,162,500	0.00	43,105,000.00	0%	2,466,267,500	0%	1145.21%	0%	276,032,000.00	92%	92%	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan		
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80%		91.52%		70%		86%		91.03%		91.03%		130%		92%		92%				
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>															70.00%	575.00%			38.57%	87.71%			
<b>Predikat Kinerja</b>															Sedang	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Tinggi			
<b>2.04 Bidang Pertanahan</b>																							
2.04.01	Program Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum	Tersedianya lahan untuk fasilitas persampahan (TPA)	20 Ha	5,000,000,000	0.00	59,585,000.00	0 Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	59,585,000.00	0%	1%	Dinas PU dan Penataan Ruang		
		Luas areal permakaman bertambah 2 ha	32.00		0.00		31.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0%	0%			
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>															0%	0%			0%	0%			
<b>Predikat Kinerja</b>															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
<b>2.05 Bidang Lingkungan Hidup</b>																							
2.05.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya pelayanan Pencegahan Pencemaran air 100% (jumlah perusahaan yang dipantau dibagi jumlah perusahaan target pantau dikali 100%)	100%	616,500,000	100%	237,618,100	100%	180,000,000.00	0.00	0.00	24.00	16,436,950.00	24%	16,436,950.00	24%	9.13%	124%	254,055,050.00	62%	41%	Dinas Lingkungan Hidup		
		Meningkatnya pelayanan Pencegahan Pencemaran udara dari sumber tidak bergerak 100% (jumlah perusahaan yang dipantau dibagi jumlah perusahaan target pantau dikali 100%)	100%	339,075,000	100%	40,246,250.00	100%	150,000,000.00	0.00	0.00	50%	2,495,000.00	50%	2,495,000.00	50%	1.66%	150%	42,741,250.00	75%	13%			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
		Meningkatnya pelayanan pengendalian B3 dan limbah B3 10% (jumlah perusahaan yang dipantau dibagi jumlah perusahaan target pantau dikali 100%)	10%	678,150,000	5.42%	150,737,000.00	8%	750,000,000.00	0.00	0.00	50%	144,929,250.00	50%	144,929,250.00	625%	19.32%	150%	295,666,250.00	75%	44%	
		Meningkatnya pelayanan pengaduan masyarakat akibat pencemaran atau kerusakan LH 100% % (jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan yang masuk dikali 100%)	100%	421,275,000	100%	0.00	100%	250,000,000.00	0.00	0.00	50%	0.00	50%	0.00	50%	0.00%	150%	0.00	75%	0%	
2.5.1 7	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya Pelayanan Konservasi Air (jumlah laporan yang tersusun dibagi jumlah target laporan yang tersusun dikali 100%)	100%	318,500,000	100%	93,967,000	80.00%	150,000,000.00	0.00	0.00	25%	11,227,450.00	25%	11,227,450.00	31%	7.48%	0%	105,194,450.00	0%	33%	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Pelayanan Konservasi Lahan/Tanah (jumlah laporan yang tersusun dibagi jumlah target laporan yang tersusun dikali 100%)	100%	318,500,000	100%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00%	0%	0	0%	0%	
		Meningkatnya Pelayanan Konservasi Udara/Atmosfer (jumlah laporan yang tersusun dibagi jumlah target laporan yang tersusun dikali 100%)	100%	563,500,000	60%	178,784,000.00	80.00%	250,000,000.00	0.00	0.00	25%	51,315,000.00	25%	51,315,000.00	31%	20.53%	85%	230,099,000.00	43%	41%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
2.05.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Jumlah kelengkapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingk. 69 % (Jumlah ketersediaan instrumen dibagi standar instrumen yang ada di UU32/2009 dikali 100%)	69%	1,215,006,000	39%	207,421,000.00	62%	150,000,000.00	0.00	0.00	20%	2,821,000.00	20%	2,821,000.00	32%	1.88%	120%	210,242,000.00	60%	17%	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya pelayanan informasi kualitas air dan udara (Jumlah titik pantau kualitas air : 28 titik dan udara ambient : 20 titik (jumlah titik pantau yang diuji dibagi jumlah titik pantau keseluruhan dikali 100%))	100%	974,194,000	100%	245,477,000.00	100%	200,000,000.00	0.00	0.00	50%	0.00	50%	0	50%	0.00%	150%	245,477,000.00	75%	25%	
		Meningkatnya pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa 100% (jumlah laporan yang tersusun dibagi jumlah target laporan yang tersusun dikali 100%)	100%	3,283,800,000	100%	223,381,000.00	100%	200,000,000.00	0.00	0.00	0%	3,836,000.00	0%	3,836,000.00	0%	1.92%	0%	227,217,000.00	0%	7%	
2.05.31	Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat	Meningkatnya Jumlah Bank Sampah Tingkat RW (jumlah output target dibagi jumlah output target akhir dikali 100%)	100%	1,200,000,000	26%	244,561,000	35%	125,000,000.00	8%	0	8%	10,430,000.00	16%	10,430,000.00	46%	8.34%	18%	1%	18%	0%	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Jumlah Sekolah Berbudaya Lingkungan (jumlah output target dibagi jumlah output target akhir dikali 100%)	20%	800,000,000	13%	156,768,000	16%	100,000,000.00	0	0	16%	50,000,000.00	16%	50,000,000.00	100%	50.00%	15%	26%	73%	0%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
		Meningkatnya Jumlah Green Office (SKPD)(jumlah output target dibagi jumlah output target akhir dikali 100%)	100%	400,000,000	75%	-	78%	100,000,000.00	0	0	78%	30,000,000.00	78%	30,000,000.00	100%	30.00%	77%	8%	77%	0%	
		Meningkatnya perolehan point Adipura (nilai yang diperoleh dibagi 75 dikali 100 %)	100%	1,600,000,000	100.00%	188,378,600	100%	100,000,000.00	0	0	25%	50,000,000.00	25%	50,000,000.00	25%	50.00%	62.5%	15%	63%	0%	
1.08.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya volume sampah terangkut (m3/hari)	700	37,900,000,000	680	21,000,000,000	690	12,650,000,000.00	100%	0%	100%	566,624,000.00	100%	566,624,000.00	0%	4.48%	100%	21,566,624,000	100%	57%	Dinas Lingkungan Hidup
		Volume sampah di tampung (m3/hari)	720	6,150,000,000	694	0.00	707	1,375,000,000.00	0%	0%	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00%	0%	0%	0%	0%	
		Pengelolaan sampah berbasis RW / RW zero waste	20%	15,000,000,000	12%	0.00	16%	3,000,000,000.00	0%	0%	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00%	0%	0%	0%	0%	
1.08.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Bertambahnya RTH Publik menuju 12 % (ha)	9.81	1,500,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%	0.00	0.00	0%	0%	Dinas Lingkungan Hidup
		Taman publik yang ditata (taman)	18.00	2,400,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%	0.00	0.00	0%	0%	
		Tersedianya acuan kebijakan pengelolaan RTH	1 perda	300,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%	0.00	0.00	0%	0%	
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>															58.23%	10%			39.75%	13.88%	
<b>Predikat Kinerja</b>															Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
<b>2.06</b>	<b>Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil</b>																				
2.06.23	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan		12,608,000,000		569,496,200.00	0%	981,406,600.00	0.00	0.00	0.00	66,836,800.00	0%	66,836,800.00	0%	6.81%		636,333,000.00		5%	Disdukcapil
		KTP	100%		96%		98%		19%		38%		98%		100%		98%		98%		
		KK	100%		98%		99%		25%		25%		99%		100%		99%		99%		
2.06.24	Program pelayanan pencatatan sipil	Cakupan penerbitan :	1000 akta lahir 360 akta kematian	9,500,000,000																	Disdukcapil
		Akta Kelahiran	95%		91%	224,893,000.00	93%	121,139,200.00	22%	0.00	44%	63,630,000.00	93%	63,630,000.00	100%	52.53%	93%	63,630,000.00	93%	0.67%	
		Akta Kematian	80%		76%	35,490,000.00	78%	42,748,800.00	0%	0.00	0%	14,880,000.00	78%	14,880,000.00	100%	34.81%	78%	14,880,000.00	78%	0.16%	
2.06.25	Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Menurunnya tingkat selisih data dasar kependudukan	10%	4,400,000,000	14%	437,548,800	12%	351,360,000.00	3%	40,075,000.00	5%	215,050,000.00	12%	215,050,000.00	100%	61.21%	12%	215,050,000.00	12%	5%	Disdukcapil

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
2.06.26	Program perencanaan kebijakan kependudukan	Tersedianya pedoman/ arahan kebijakan kependudukan 100%	100%	4,000,000,000	100%	719,092,500	100%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	100%	0.00	100%	0.00%	100%	0	100%	0%	Disdukcapil
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>															85.71%	31%		68.57%	2%		
<b>Predikat Kinerja</b>															Tinggi	Sangat Rendah		Sedang	Sangat Rendah		
<b>2.07 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa</b>																					
2.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Terbentuknya posyantek di 5 kecamatan dan 2 wartek	5 posyantek dan 2 wartek	2,000,000,000	0 wartek	582,734,000	1 wartek dan 1 paket pameran	450,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0	0	0%	0%	Dinas Sosial PP & PA
2.07.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	Meningkatnya nilai partisipasi masyarakat/ nilai bantuan RW	10%	2,284,000,000	7.2%	49,322,000	8.60%	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0%	0%	0	0%	0%	Dinas Sosial PP & PA
2.07.26	Program RW Bersih	Rasio RW K3	50%	1,000,000,000	30%	397,798,600	40%	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0%	0%	0	0	0%	Dinas Sosial PP & PA
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>															0%	0%		0%	0%		
<b>Predikat Kinerja</b>															Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah		
<b>2.08 Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</b>																					
2.08.15	Program Keluarga Berencana	Tercapainya PUS istri di bawah 20 tahun sebanyak 3.5%	3.5%	5,350,000,000	0.66%	3,129,490,830	3.64%	5,100,000,000.00	0.66	12,525,000.00	0.66	794,641,500.00	0.66%	807,166,500.00	18.13%	15.83%	1.32%	3,936,657,330	37.71%	73.58%	DPPKB Kota Cirebon
		Meningkatkan peserta KB baru	7000 akseptor	300,000,000	6823 akseptor	50,800,000.00	7000 akseptor	300,000,000.00	1782 Akseptor	3,400,000.00	1444 Akseptor	36,249,000.00	3226 Akseptor	39,649,000.00	46.09%	13.22%	10058 Akseptor	90,449,000.00	143.68	30%	
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>															32.11%	14.52%		90.69%	51.79%		
<b>Predikat Kinerja</b>															Sangat Rendah	Sangat Rendah		Tinggi	Rendah		
<b>2.09 Bidang Perhubungan</b>																					
2.09.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	100%	22,063,000,000	80%	46,167,500	90%	500,000,000	1.05%	1,050,000.00	49.14%	49,140,000.00	50.19%	50,190,000	55.77%	10%	130.00%	96,360,000	130%	0.44%	Dishub
2.09.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terselenggaranya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	100%	1,510,000,000	90%	57,563,000	95%	1,360,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	0.00%	0%	80.00%	57,560,000	80%	3.81%	Dishub
2.09.17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Cakupan wilayah pelayanan angkutan umum	100%	13,768,000,000	80%	397,500,000	90%	1,000,000,000	0.00	0.00	11.06	105,025,000.00	11.06%	105,025,000.00	12.29%	11%	91%	502,530,000	91%	3.65%	Dishub

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
2.09.19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Terwujud Keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kelancaran ber Lalu Lintas	100%	8,295,000,000	85%	5,193,334,553	90%	7,295,000,000	13.84	830,389,000	57.04	3,422,281,000	70.88%	4,252,670,000	78.76%	58%	151%	9,157,640,000	151%	110.40%	Dishub
2.09.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Menurunnya tingkat kecelakaan karena kondisi teknis dan laik jalan kendaraan	100%	2,800,000,000	0.00	0.00	90%	470,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	0%	0	0.00%	0.00%	Dishub
2.09.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Pelayaran	Menurunnya kasus kecelakaan pelayaran	100%	2,630,000,000	40%	51,580,000	90%	410,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00%	0%	0%	0	0.00%	0.00%	Dishub
2.09.24	Program Peningkatan Pelayaran Parkir	Terwujudnya Sistem Perparkiran yang Teratur	100%	2,800,000,000	80%	464,838,200	90%	470,000,000.00	8.71	47,895,000.00	50.79	279,349,000.00	59.50%	327,244,000	66.11%	70%	140%	792,080,000	140%	28.29%	Dishub
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>															30.42%	21.21%			84.57%	20.94%	
<b>Predikat Kinerja</b>															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah	
<b>2.10 Bidang Komunikasi dan Informatika</b>																					
2.10.17	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Rasio SDM yang memiliki sertifikat atau dilatih / jumlah aparatur bidang kominfo	100%	340,000,000	0%	-	90%	51,024,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0%	0%	0	0%	0%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2.10.21	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi	Tersedia dan terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebagai sarana penunjang peningkatan kinerja aparatur	100%	6,200,000,000	0%	0.00	90%	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	44,165,000.00	0%	44,165,000.00	0%	29%	0%	44,165,000.00	0.00%	0.71%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>															0.00%	15%			0.00%	0.00%	
<b>Predikat Kinerja</b>															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
<b>2.11 Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>																					
2.11.16	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Meningkatnya kemitraan, dan berwirausaha dalam manajemen usaha	455 KUMKM	1,390,000,000	280 KUMKM	370,154,000	80 KUMKM	80,000,000.00	40 KUMKM	36,000,000.00	40 KUMKM	39,358,000.00	80 KUMKM	75,358,000.00	100%	94%	360 KUMKM	445,512,000.00	79%	32%	Disperkop UKM

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		PD Penanggung jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									K	Rp	K	Rp										
2.11.17	Program pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Berkembangnya KUMKM	250 KUMKM	1,295,000,000	230 KUMKM	423,943,350,000	1 pameran (10 KUMKM)	41,485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	230 KUMKM	423,943,350,000	92%	33%	Disperkop UKM
2.11.18	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	285 koperasi	4,350,000,000	236 koperasi	952,197,250	250 koperasi	135,679,000.00	0.00	13,944,000.00	199 koperasi	54,500,000.00	199 koperasi	68,444,000.00	80%	50%	199 koperasi	1,020,641,000	70%	23%	Disperkop UKM	
2.11.19	Program Lembaga Ekonomi Mikro Berbasis RW	Lembaga ekonomi mikro berbasis RW sejumlah 247 koperasi /pra koperasi	60 koperasi	8,000,000,000	52 koperasi	2,915,696,350	15 koperasi	673,322,450.00	0.00	0.00	0.00	13,350,000.00	0.00	13,350,000.00	0%	2%	52 koperasi	2,929,046,000	87%	37%	Disperkop UKM	
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>															44.90%	36.66%			81.90%	31.22%		
<b>Predikat Kinerja</b>															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah		
<b>2.12 Bidang Penanaman Modal</b>																						
2.12.20	Program Penataan dan Pelayanan Perijinan	Penambahan Jumlah Kewenangan Perizinan	45 jenis	1,525,000,000	30 jenis	923,884,600	45 jenis	893,534,600.00	64 jenis	70,323,000.00	64 jenis	245,040,750.00	128 jenis	315,363,750.00	284%	35%	158 jenis	1,239,248,350	351%	81.3%	Dinas PMPTSP	
		Tersedianya sistem pelayanan perijinan	1 sistem	0.00	1 sistem	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100%	0%	2	0	200%	0.0%		
		tersedianya dasar hukum penerapan insentif dan disinsentif investasi	1	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100%	0%	2	0	200%	0.0%		
2.12.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi investasi	Meningkatnya nilai investasi	0.2%			352,090,000		930,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,090,000.00	0%	38%	0	0	0	0	Dinas PMPTSP	
		PMA (Milyar)	400	930,000,000	504,946,000,000	849,000,000.00	930,000,000.000	318,540,000.00	123,780,000,000.00	11,540,000.00	290,453,000,000	67,514,500.00	414,233,000,000	79,054,500	45%	25%	919,179,000,000	928,054,500	230%	99.79%		
		PMDN (Milyar)	600	0.00	1,357,154,214,039	0.00	624,000,000,000	0.00	466,297,666,036.00	0.00	901,389,667,540	0.00	1,367,687,333,312	0.00	219%	0%	2,724,844,155,512	0.00	454.14%	454.1%		
2.12.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah kerjasama investasi	2	900,000,000,000	0.00	-	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0	0	0%	0.0%	Dinas PMPTSP	
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>															106.88%	14.00%			205.01%	90.75%		
<b>Predikat Kinerja</b>															Sangat tinggi	Sangat Rendah			Sangat tinggi	Tinggi		
<b>2.13 Bidang Kepemudaan dan Olah Raga</b>																						

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		PD Penanggung jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									K	Rp	K	Rp										
2.13.22	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya jumlah pemuda yang memiliki keterampilan keupacaraan dan kepemimpinan	150 orang	625,000,000	182 orang	0.00	150 orang	125,000,000.00	30.00	0.00	33.00	21,514,500.00	63.00	21,514,500.00	77%	17%	63.00	519,507,800.00	77%	83%	Disporabudpar	
2.13.17	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan kecakapan hidup	250 orang	1,195,000,000	150 orang	119,591,500	50 orang	530,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	150 orang	119,591,500	0%	10%	Disporabudpar	
2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah atlit yang dibina/tahun dari 12 cabang	96 orang	7,140,000,000	100%	899,061,500	96 orang	1,219,200,000	25%	0.00	25%	129,144,000.00	50%	129,144,000.00	50%	11%	50%	1,028,205,500	50.00%	14%	Disporabudpar	
2.13.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Sarana olah raga skala kecamatan yang memenuhi standar pada 8 lokasi	8 lokasi	1,029,000,000	100%	97,580,000	2 lokasi	334,660,000.00	66.67	115,112,600	0.00	77,870,000.00	66.67%	192,982,600.00	167%	58%	66.67%	290,562,600.00	67%	28%	Disporabudpar	
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>															73.38%	21.37%			48.37%	33.94%		
<b>Predikat Kinerja</b>															Sedang	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
<b>2.16</b>	<b>Kebudayaan</b>																					
2.16.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terlindunginya nilai budaya sebesar 5% pada tahun 2018	5%	2,152,500,000	5%	70,540,000	5%	150,000,000	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0%	0%	70,540,000.00	0%	3.28%	Disporabudpar	
		Rasio bangunan cagar budaya yang terevitalisasi di Kota Cirebon	50%	1,767,500,000	35%	131,145,000	42%	160,895,000	22.5%	0.00	22.5%	31,755,000.00	45%	31,755,000.00	107%	20%	0.45%	162,900,000.00	1%	9.22%		
2.16.17	Program pengelolaan keragaman budaya	Cakupan Gelar Seni (3 dari 4 keg. SPM)	100%	4,625,000,000	100%	170,430,000	100%	975,000,000.00	28%	0.00	23%	41,700,000.00	51%	41,700,000.00	51%	4%	51%	713,950,000.00	51%	15.44%	Disporabudpar	
		Cakupan Kajian Seni (jumlah kegiatan yang dilaksanakan dibagi 8 kegiatan SPM)	100.00	14,220,000,000	100%		100%	2,990,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0.00	0.00	0%	0.00%	Disporabudpar	
		Cakupan fasilitas seni (jumlah kegiatan yang dilaksanakan dibagi 3 kegiatan SPM)	100.00	785,000,000	100%		100%	185,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0.00	0.00	0%	0.00%	Disporabudpar	
		Cakupan tempat kesenian (minimal 1 lokasi)	2 lokasi	6,000,000,000	55%		1 lokasi (75%)	1,500,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0.00	0.00	0%	0.00%	Disporabudpar	
2.16.18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Cakupan misi kesenian minimal 1 kali setahun	100%	840,000,000	100%	198,680,000	100%	190,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0	198,680,000.00	0%	23.65%	Disporabudpar		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		PD Penanggung jawab	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									K	Rp	K	Rp										
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>																22.59%	3.43%			7.41%	7.37%	
<b>Predikat Kinerja</b>																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
<b>2.17 Bidang Perpustakaan</b>																						
2.17.21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan tingkat RW	6 RW, 6 Kelurahan	4,997,125,000	4 RW, 4 Kelurahan	1,667,820,900	1 RW, 1 Kelurahan	362,600,000.00	0.00	54,214,000.00	0.00	17,990,000.00	0.00	72,204,000.00	0%	0%	4 RW, 4 kelurahan	1,740,024,900	67%	35%	Dispusipda	
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>																0%	0%			67%	35%	
<b>Predikat Kinerja</b>																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah	
<b>2.18 Bidang Kearsipan</b>																						
2.18.15	Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan	Rasio SKPD yang tertib administrasi kearsipan / jumlah SKPD	18/52	1,221,020,000	12	255,300,950.00	3	29,450,000.00	1.00	20,792,000.00	0.00	0.00	1.00	20,792,000.00	33%	71%	13	276,092,950.00	72%	22.00%	Dispusipda	
2.18.16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah arsip vital dan statis	1060 berkas	2,506,530,000	840 berkas	492,806,000	110 berkas	212,971,000.00	10 berkas	10,396,000.00	50 berkas	44,671,000.00	60 berkas	55,067,000.00	55%	26%	900 berkas	547,873,000.00	85%	21.00%	Dispusipda	
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>																43.94%	48.23%			78.45%	21.50%	
<b>Predikat Kinerja</b>																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah	
<b>3 Urusan Pilihan</b>																						
<b>3.01 Bidang Kelautan dan Perikanan</b>																						
3.01.20	Program peningkatan produksi perikanan budidaya	Meningkatnya produksi perikanan Budidaya sebesar 3% per tahun	345 ton	2,525,000,000	355,88 ton	4,326,779,000	336 ton	1,781,899,000	50,08 ton	31,336,000.00	49,07 ton	491,565,000.00	99,15 ton	522,931,000.00	30%	29%	455,03 ton	4,849,709,000	132%	192%	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan	
3.01.21	Program Peningkatan produksi perikanan tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap sebesar 3% per tahun	4600 ton	400,000,000	4485,82 ton	174,789,900	4480 ton	224,506,000.00	901,67 ton	31,899,000.00	1,056,24 ton	79,077,000.00	1,957,91 ton	110,976,000.00	44%	49%	6,443,73 ton	285,766,000	140%	71%	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan	
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>																36.61%	39.39%			135.99%	131.75%	
<b>Predikat Kinerja</b>																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
<b>3.02 Bidang Pariwisata</b>																						
3.02.15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan sebesar 5% dari tahun sebelumnya	639.683 wisatawan	3,465,000,000	83.33%	433,316,500	609.221 orang	550,000,000	0.00	0.00	15%	128,000,000.00	15%	128,000,000.00	18%	23%	98.33%	561,316,500.00	98.33%	16%	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
									K	Rp	K	Rp											
3.02.16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Obyek dan Daya Tarik Wisatawan yang dikembangkan	1 kawasan	2.500.000.000	0 kawasan	65.602.000.00	1 Kawasan	500.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0 kawasan	65.602.000.00	0.00%	3%	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata		
3.02.17	Program pengembangan kemitraan	Jumlah kerjasama kepariwisataan	4 jenis	3.470.000.000	100.00%	29.960.000	2 jenis	1.800.000.000	10.00%	0.00	60.00%	254.747.500.00	70.00%	254.747.500.00	100%	14%	80.00%	284.707.500.00	80.00%	8%	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>															39.33%	12.48%			59.44%	9.01%			
<b>Predikat Kinerja</b>															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah			
<b>3.03 Bidang Pertanian</b>																							
3.03.19	Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/ Perkebunan	Peningkatan produktivitas padi, palawija dan hortikultura	Padi 6,0 ton/ha, palawija 9,26 ton/ha, hortikultura 4,892 ton/ha	1.500.000.000	Padi 6,25 ton/ha, palawija 4,73 ton/ha, hortikultura 2,86 ton/ha	2.258.877.000	Padi 5,6 ton/ha palawija 8,9 ton/ha, hortikultura 4,7ton/ ha	699.175.000.00	Padi 4,61 ton/ha , palawija 2,0 ton/ha, hortikultura 1,3 ton/ha	100.820.500	Padi 4,7 ton/ha , palawija 5,3 ton/ha, hortikultura 3,8 ton/ha	165.868.500.00	Padi 4,7 ton/ha , palawija 5,3 ton/ha, hortikultura 3,8 ton/ha	266.689.000.00	84%	38%	60.00%	2.525.566.000	168%	168%	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan		
3.03.24	Program Peningkatan Produksi Peternakan	Peningkatan jumlah produksi daging sapi dan daging babi	400.000 kg daging sapi, 50.000 kg daging babi	1.699.300.000	188.631 kg daging sapi, 111.756 kg daging babi	1.260.661.000	380.000 kg daging sapi, 48.000 kg daging babi	907.580.000.00	57.340 kg daging sapi, 28.456 kg daging babi	190.211.750	41.185 kg daging sapi, 37964 kg daging babi	302.973.05	98.525 kg daging sapi, 66.420 kg daging babi	493.184.800.00	26%	54%	103.00%	1.753.846.000	103%	103%	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan		
3.03.25	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan, dan perikanan	Meningkatnya akses pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan dari 50% pada tahun 2012 menjadi 75% pada tahun 2018	75%	900.000.000	60%	139.900.000.00	70%	195.000.000.00	60%	4.265.000.00	60%	129.506.000.00	120.00%	133.771.000.00	86%	69%	60.00%	273.671.000.00	80.00%	30%	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>															65%	54%			117%	101%			
<b>Predikat Kinerja</b>															Rendah	Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
<b>3.04 Bidang Kehutanan</b>																							
3.04.16	Program Rehabilitasi hutan dan lahan	Terehabilitasinya lahan kritis / penghijauan kota	203 ha	2.250.000.000	197 ha	273.309.000	200 ha	450.000.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0%	0%	0	0%	0%	0%	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>															0%	0%			0%	0%			
<b>Predikat Kinerja</b>															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
<b>3.06 Bidang Perdagangan</b>																							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
2.06.19	Program Pembinaan Pedagang Kakilima	Jumlah PKL yang dibina 3% dari PKL yang terdaftar	1800 PKL	7,400,000,000	280 PKL	1,780,655,800	185 PKL	2,970,700,000	0.00	0.00	0.00	92,814,000.00	0.00	92,814,000.00	0%	3%	280 PKL	187,347,000.00	0%	3%	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM
		Rasio PKL yang belum menempati lokasi yang telah ditetapkan	40%	750,000,000	280 PKL		185 PKL	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	0%	0%	0%	0	0%	0%	
		Jumlah Kawasan Peruntukan bagi PKL	6	1,000,000,000	2 kegiatan		3 kegiatan, 3 kali	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0.00	0.00	0%	0%	
Rata-rata capaian kinerja (%)															0%	0%			0%	1%	
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
<b>4</b>	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>																				
<b>4.01</b>	<b>Bidang Administrasi Pemerintahan</b>																				
1.20.31	Program Penataan Kelembagaan	Rasio Jumlah SKPD yang disusun kebijakan peta jabatan, standar kompetensi/ Jumlah SKPD se Kota Cirebon	100%	2,750,000,000	100%	458,900,000	95%	250,105,000	0.00	27,105,000.00	0.00	19,210,000.00	0.00	46,315,000.00	0%	18.52%	100%	505,215,000	100%	18%	Setda
1.20.32	Program Pembinaan Pemerintahan	Terwujudnya kesepakatan seluruh titik koordinat Pilar Batas Utama (PBU)	25 titik	400,000,000	18 titik	464,668,000	0 titik	50,971,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0 titik	0.00	0%	0%	18 titik	464,668,000.00	72%	116%	Setda
1.20.40	Program Peningkatan Kualitas Sarana Peribadatan	Rasio sarana dan prasarana peribadatan yg memperoleh bantuan dibandingkan dengan jumlah sarana dan prasarana per-ibadatan seluruhnya	90%	500,000,000	58.30%	18,851,500	85%	58,791,000.00	0.00	0.00	84%	18,836,000.00	84%	18,836,000.00	99%	32%	142%	37,687,500	158%	8%	Setda
1.20.41	Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan	Prestasi 3 besar tingkat propinsi	Peringkat 6 Tingkat Propinsi	3,900,000,000	peringkat 19 tingkat propinsi	647,957,800	peringkat 7 tingkat propinsi	610,740,050.00	0.00	41,152,250.00	peringkat 14 tingkat propinsi	141,227,450.00	peringkat 14 tingkat propinsi	182,379,700.00	50%	29.86%	peringkat 14 tingkat propinsi	830,337,500.00	50%	21%	Setda
Rata-rata capaian kinerja (%)															37.21%	20.10%			95.03%	40.84%	
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat tinggi	Sangat Rendah	
<b>4.02</b>	<b>Bidang Pengawasan</b>																				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		PD Penanggung jawab		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
									K	Rp	K	Rp											
4.02.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Menurunnya jumlah atau nilai temuan hasil pemeriksaan 6%/tahun	70 temuan	8,495,000,000	106 temuan	2,030,895,644	76%	1,620,000,000	65%	122,729,883	63%	431,830,258.00	65%	554,560,141	86%	34%	33%	1,950,709,322	0.47%	23%	Inspektorat		
		Kasus pengaduan yang diselesaikan /ditindaklanjuti dari 80% menjadi 100%	100%	2,223,200,000	90%		95%	2,038,200,000	100%	141,286,000.00	0%	395,729,750.00	100%	537,015,750	105%	26%	200%	2,707,303,494	200%	122%	Inspektorat		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>														95.39%	30.29%			100.24%	72.37%				
<b>Predikat Kinerja</b>														Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sedang				
<b>4.03 Bidang Perencanaan</b>																							
4.03.15	Program Pengembangan Data/Informasi Perencanaan	Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (Ketersediaan data dalam SIPD)	82%	1,196,000,000	0.00%	0.00	76%	580,000,000	0.00	7,045,000.00	4.76	110,523,500.00	5.00%	117,568,500	7%	20%	4.76%	117,568,500	5.80%	9.83%	BPPPPD		
4.03.20	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD (jumlah program RKPD tahun ber kenaan/ jumlah program RPJMD yg harus dilaksanakan thn berkenaan x100%	95.00%	1,905,000,147	0.00%	0.00	90%	980,000,000	6.25	33,493,000.00	37.50	328,686,500.00	43.75%	362,179,500	49%	37%	43.75%	362,179,500	46.05%	19.01%	BPPPPD		
4.03.21	Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Rasio realisasi program dan kegiatan / rencana program dan kegiatan dalam RKPD	98.00%	609,000,000	0.00%	0.00	95%	290,000,000	0.00	38,735,000.00	25.00	103,400,000.00	25.00%	142,135,000	26%	49%	25.00%	142,135,000	25.51%	23.34%	BPPPPD		
4.03.33	Program Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan	Terkendalinya dan terawasinya koordinasi penanggulangan kemiskinan di kota	100.00%	294,000,000	0.00%	-	95.00%	890,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00%	178,244,000	100%	20%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	BPPPPD		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>														45.38%	31.57%			19.34%	13.05%				
<b>Predikat Kinerja</b>														Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
<b>4.04 Bidang Keuangan</b>																							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
4.04.3	Program Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah	Opini penilaian BPK terhadap keuangan dan aset daerah menuju WTP di tahun 2018	WTP	5,200,589,875	WTP	3,055,160,864.00	WTP	632,529,000.00	0.00	0.00	0.00	187,279,500.00	WTP	187,279,500.00	WTP	30%	WTP	3,242,440,364.00	100.00%	62.35%	BKD
4.04.44	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya PAD	75%	17,402,000,000	13.50%	0.00	15%	3,602,000,000.00	0.00	850,892,627.00	0.00	1,604,402,627.00	0.00%	2,455,295,254.00	0%	68%	65.57%	11,519,278,054.00	87.43%	66.20%	BKD
4.04.45	Program Peningkatan Kualitas Penganggaran dan Realisasi APBD	APBD tepat waktu	100%	23,945,200,000	100%	8,233,085,500.00	100%	5,309,060,000.00	12.86%	345,578,700.00	26.78%	719,380,300.00	26.78%	1,064,959,000.00	27%	20%	81.7%	9,298,044,500.00	81.70%	38.83%	BKD
4.04.46	Program Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi APBD.	Transparansi/publikasi APBD	100%	6,065,870,000	100%	3,599,141,825.00	100%	1,259,521,000	0.48%	6,000,000.00	12.98%	163,479,000.00	13%	169,479,000.00	13%	13%	78.25%	3,768,620,825.00	78.25%	62.13%	BKD
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>															9.94%	32.82%			86.84%	57.38%	
<b>Predikat Kinerja</b>															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Rendah	
<b>4.05</b>	<b>Bidang Kepegawaian</b>																				
4.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya sistem kesejahteraan pegawai	100%	2,500,000,000	85%	149,871,000	95%	50,000,000.00	9.00	12,350,000.00	22.00	12,350,000.00	22%	12,350,000.00	23%	25%	107%	1,315,547,350.00	107%	52.62%	BKPPD
4.05.28	Program Pendidikan Kedinasan	Rasio Aparatur yang menduduki jabatan struktural yang sebelumnya telah mengikuti diklatpim	70%	14,850,000,000	74%	114,365,000	68%	3,445,000,000	11%	320,999,300.00	11%	659,861,400.00	11%	659,861,400.00	16%	19%	85%	1,003,921,700.00	121%	3%	BKPPD
4.05.30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Menurunnya 60% kasus pelanggaran disiplin/1000 PNS	3 kasus/1000 PNS	4,330,000,000	4 kasus/1000 PNS	0.00	4 kasus/1000 PNS	923,000,000	0.14	230,364,975.00	1.00	590,749,700.00	1.00	590,749,700.00	25%	64%	5%	2,714,537,800.00	2%	29%	BKPPD
4.05.3	Program Peningkatan Kualitas Religius Aparatur	Pelaksanaan jadwal pengajian rutin bulanan di SKPD	100%	3,435,000,000	28%	565,337,000	100%	760,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	BKPPD
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>															16.08%	26.96%			57.52%	21.16%	
<b>Predikat Kinerja</b>															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>											68,950,824,448		162,624,464,869		231,575,289,317						
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM....)</b>															#####	35.22%			#####	35.22%	
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM....)</b>															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2017		PD Penanggung jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									K	Rp	K	Rp									
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan dan penetapan keuangan (APBD) tepat waktu</li> <li>2. Sinergitas yang baik antar perangkat daerah dalam melaksanakan tugas untuk mencapai kinerja sesuai target</li> </ol> <p>Faktor penghambat pencapaian kinerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kelembagaan baru sesuai PP nomor 18 Tahun 2016</li> <li>2. Kurangnya Sumber Daya Manusia di beberapa perangkat daerah, sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat</li> </ol> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan terutama program dan kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2013-2018</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya : melakukan inventarisir dan evaluasi atas program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun ini, sebagai bahan penyusunan RKPD tahun depan</p>																					

Dievaluasi, Agustus 2017

KEPALA BPPPPD KOTA CIREBON,

(MOHAMMAD ARIEF KURNIAWAN, ST)

Dievaluasi, Agustus 2017

WALI KOTA CIREBON,

(Drs. NASRUDIN AZIS)